

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	46
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	63
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DAERAH	67
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	67
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	68
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	71
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Penunjang	109
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	
Kabupaten Pacitan	116
BAB III CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	195
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah	
Kabupaten Pacitan.....	196
3.1.1 Target Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi	
Pangan Berkualitas	196
3.1.2 Realisasi Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi	
Pangan Berkualitas	196
3.1.3 Target Kinerja Program Perikanan.....	197
3.1.4 Realisasi Kinerja Program Perikanan	198
3.1.5 Target Kinerja Program Perikanan.....	200
3.1.6 Realisasi Kinerja Program Perikanan	200
3.1.7 Target Kinerja Program Perikanan.....	201
3.1.8 Realisasi Kinerja Program Perikanan	202
3.1.9 Target Program Merdeka Belajar Episode ke 23 Buku Bacaan	
Bermutu Untuk Literasi Indoensia.....	203
3.1.10 Realisasi Program Merdeka Belajar Episode ke 23 Buku	
Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indoensia.....	203
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah	
Kabupaten Pacitan.....	218
3.2.1 Target Kinerja Program Optimalisasi Reproduksi	218
3.2.2 Realisasi Kinerja Program Optimalisasi Reproduksi	218
3.2.3 Target Kinerja Program	219
3.2.4 Realisasi Kinerja Program	220



3.2.5 Target Program Penyuluhan Pertanian.....	221
3.2.6 Realisasi Program Penyuluhan Pertanian.....	221
3.2.7 Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah	222
3.2.8 Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah	222
3.2.9 Target Program	223
3.2.10 Realisasi Program	223
3.2.11 Target Program	224
3.2.12 Realisasi Program	225
3.2.13 Target Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.....	227
3.2.14 Realisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.....	227
3.2.15 Target Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	228
3.2.16 Realisasi Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	228
3.2.17 Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	229
3.2.18 Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	229
3.2.19 Target Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024	230
3.2.20 Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024	230
3.2.21 Target Program Pembinaan Keluarga Berencana	231
3.2.22 Realisasi Program Pembinaan Keluarga Berencana	233
3.2.23 Target Program Perikanan	236
3.2.24 Realisasi Program Perikanan	238
3.3 Permasalahan dan Kendala	249
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	249
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	250
4.1 Urusan Pendidikan	250
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	250
4.1.2 Target Pencapaian	250
4.1.3 Realisasi	251



4.1.4 Anggaran.....	252
4.1.5 Dukungan Personil	255
4.1.6 Kendala Yang Dihadapi	255
4.2 Urusan Kesehatan.....	256
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	256
4.2.2 Target Capaian.....	257
4.2.3 Hasil Capaian	259
4.2.4 Anggaran.....	260
4.2.5 Dukungan Personil	262
4.2.6 Kendala Yang Dihadapi	262
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	262
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	262
4.3.2 Target Capaian.....	262
4.3.3 Realisasi.....	263
4.3.4 Anggaran.....	264
4.3.5 Dukungan Personil	265
4.3.6 Kendala Yang Dihadapi	265
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	265
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	265
4.4.2 Target Capaian.....	266
4.4.3 Hasil Capaian	266
4.4.4 Anggaran.....	267
4.4.5 Dukungan Personil	268
4.4.6 Kendala Yang Dihadapi	268
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	269
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	269
4.5.2 Target Capaian.....	369
4.5.3 Hasil Capaian	270
4.5.4 Anggaran.....	271
4.5.5 Dukungan Personil	276
4.5.6 Kendala Yang Dihadapi	276
4.6 Urusan Sosial.....	277
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	277
4.6.2 Target Capaian.....	277
4.6.3 Realisasi.....	279
4.6.4 Anggaran.....	280
4.6.5 Dukungan Personil	281
4.6.6 Kendala Yang Dihadapi	282
BAB V PENUTUP	283



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun 2024 3

Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024..... 3

Tabel 1.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 4

Tabel 1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan 5

Tabel 1.5 Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 9

Tabel 1.6 Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan 16

Tabel 1.7 Formasi CPNS..... 19

Table 1.8 Formasi PPPK 19

Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Usia Periode Desember 2024 19

Tabel 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Peride Desember 2024 21

Tabel 1.11 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang Periode Desember 2024 22

Tabel 1.12 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 26

Tabel 1.13 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang membuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja 26

Table 1.14 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 64

Table 1.15 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024..... 64

Table 1.16 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 64

Table 1.17 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 65

Table 1.18 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024 65

Table 1.19 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2024 66

Tabel 2.1 Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2023 – 2024 67

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci 71

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Penunjang 110

Tabel 2.4 Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 117

Tabel 2.5 Anggaran Pada Perjanjian Kinerja 119

Tabel 2.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target



Perjanjian Kinerja.....126

Tabel 2.7 VISI Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera..... 133

Tabel 2.8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 136

Tabel 2.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai138

Tabel 2.10 Analisis Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas141

Tabel 2.11 Analisis Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan 148

Tabel 2.12 Analisis Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan..... 151

Tabel 2.13 Analisis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ..155

Table 2.14 Analisis Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat160

Table 2.15 Analisis Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan161

Tabel 2.16 Analisis Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat..... 164

Tabel 2.17 Analisis Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 169

Tabel 2.18 Analisis Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat171

Tabel 2.19 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.....175

Tabel 2.20 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata181

Tabel 2.21 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi182

Tabel 2.22 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif.....184

Tabel 2.23 Analisis Efisiensi Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah.....188

Tabel 2.24 Analisis Efisiensi Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan.....190

Tabel 2.25 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa.....193

Tabel 3.1 Target Kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.....196

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.....197

Tabel 3.3 Target Kinerja Program Perikanan.....197

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Program Perikanan198

Tabel 3.5 Target Kinerja Program Perikanan.....200

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Program Perikanan200



Tabel 3.7 Target Kinerja Program Perikanan..... 201

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Program Perikanan 202

Tabel 3.9 Target Program Merdeka Belajar Episode ke 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia..... 203

Tabel 3.10 Realisasi Program Merdeka Belajar Episode ke 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia..... 204

Tabel 3.11 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Pacitan 209

Tabel 3.12 Target Program Optimalisasi Reproduksi 218

Tabel 3.13 Realisasi Program Optimalisasi Reproduksi 218

Tabel 3.14 Target Kinerja Program 219

Tabel 3.15 Realisasi Kinerja Program 220

Tabel 3.16 Target Program Penyuluhan Pertanian..... 221

Tabel 3.17 Realisasi Program Penyuluhan Pertanian..... 221

Tabel 3.18 Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah..... 222

Tabel 3.19 Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah..... 222

Tabel 3.20 Target Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian..... 227

Tabel 3.21 Realiasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian..... 227

Tabel 3.22 Target Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas..... 228

Tabel 3.23 Realiasi Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas..... 228

Tabel 3.24 Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 229

Tabel 3.25 Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 229

Tabel 3.26 Target Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024 230

Tabel 3.27 Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024 230

Tabel 3.28 Target Program Pembinaan Keluarga Berencana..... 231

Tabel 3.29 Realisasi Program Pembinaan Keluarga Berencana 233

Tabel 3.30 Target Program Perikanan..... 236

Tabel 3.30 Realisasi Program Perikanan 238

Tabel 3.31 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Pacitan 242



Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan250

Tabel 4.2 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan.....251

Tabel 4.3 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Pendidikan.....252

Tabel 4.4 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
.....257

Tabel 4.5 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan259

Tabel 4.6 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Kesehatan261

Tabel 4.7 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum263

Tabel 4.8 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....263

Tabel 4.9 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Pekerjaan Umum264

Tabel 4.10 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat266

Tabel 4.11 Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat267

Tabel 4.12 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Perumahan Rakyat.....268

Tabel 4.13 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas269

Tabel 4.14 Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas270

Tabel 4.15 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Trantibumlinmas272

Tabel 4.16 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial.....278

Tabel 4.17 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial.....279

Tabel 4.18 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Sosial.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69, Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek



Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km², dimana secara administratif terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 167 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km². Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km².

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 24,26mm³, sedangkan curah hujan terkecil pada bulan September sebesar 2,19mm³.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DONOROJO	18.711	19.148	37.859
2	PRINGKUKU	16.251	16.490	32.741
3	PUNUNG	18.286	18.772	37.058
4	PACITAN	38.755	39.497	78.252
5	KEBONAGUNG	23.788	22.914	46.702



NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
6	ARJOSARI	21.112	20.705	41.817
7	NAWANGAN	26.240	26.020	52.260
8	BANDAR	22.758	22.450	45.208
9	TEGALOMBO	26.263	26.095	52.358
10	TULAKAN	43.827	43.166	86.993
11	NGADIROJO	23.938	24.152	48.090
12	SUDIMORO	17.453	17.280	34.733
JUMLAH		297.382	296.689	594.071

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk Tahun 2024 mencapai 594.071 jiwa terdiri atas 297.382 jiwa penduduk laki-laki dan 296.689 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa proporsi penduduk di wilayah Kecamatan Tulakan terbanyak dengan jumlah sebesar 86.993 jiwa atau mencapai 14,64 % dari total penduduk, sedangkan Kecamatan Pacitan berada pada posisi kedua dengan jumlah sebesar 78.252 atau mencapai 13,17% dari total penduduk, walaupun merupakan kecamatan kota di Kabupaten Pacitan.

Penduduk Kabupaten Pacitan dengan jumlah 594.071 jiwa tersebut terbagi menjadi penduduk usia kerja (15 Tahun ke Atas) dan bukan usia kerja. Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH	%
1	Petanian/Perkebunan/ Peternakan	262.084	44,12%
2	Perikanan / Kelautan	2.768	0,47%
3	Pertambangan / Industri	298	0,05%
4	Perdagangan	1.980	0,33%
5	Angkutan /Transportasi	1.634	0,28%
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	3.816	0,64%
7	Jasa-jasa	1.814	0,31%
8	Pemerintahan	4.000	0,67%
9	Kesehatan	894	0,15%
10	Pendidikan	3.769	0,63%
11	Keagamaan	24	0,00%
12	Lain-lain		
	- Pensiunan	3.512	0,59%



NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH	%
	-Belum/ tdk bekerja	104.005	17,51%
	-Mengurus rumah tangga	65.797	11,08%
	-Pelajar mahasiswa	135.859	22,87%
	-Lain-lain	1.817	0,31%
JUMLAH		594.071	100,00%

Sumber : Dinas Dukcapil Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 44,12 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan dan perusahaan swasta yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumber daya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
 Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Tidak/Blm Sekolah	82.552	13,89%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	46.057	7,75%
3.	Tamat SD/Sederajat	209.224	35,21%
4.	SLTP/Sederajat	122.483	20,61%
5.	SLTA/Sederajat	104.350	17,56%
6.	Diploma I/II	2.322	0,39%
7.	Akademi/Dipl.III/S. Muda	3.144	0,52%
8.	Diploma IV/Strata-1	22.917	3,85%
9.	Strata-2	991	0,16%
10	Strata-3	31	0,005%
Jumlah		594.071	100,0%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan



Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan relative rendah hal ini ditunjukan dengan besarnya jumlah penduduk yang tamat SD sejumlah 35,21% dari jumlah penduduk Pacitan. Sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 13,89 % yang tentunya harus diupayakan agar mereka dapat segera mendapatkan Pendidikan yang layak.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik gard skill maupun soft skill.

Perlindungan dalam bentuk hak sipil bangsa Indonesia dengan cara memberikan identitas penduduk, pemerintah kabupaten pacitan untuk memenuhi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap warga, memiliki beberapa terobosan atau inovasi antara lain,

1. Pelayanan terpadu
2. Jemput bola Perekaman ktp el penduduk rentan (jompo, disabilitas dan odgj)
3. Jemput bola Perekaman ktp el di sekolah
4. Layanan Adminduk di 12 Kantor Kecamatan.
5. Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di DPMPTSP Kabupaten Pacitan.

Dengan beberapa terobosan yang dilakukan harapannya masyarakat Kabupaten Pacitan dapat memperoleh dokumen kependudukan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Sehingga masyarakat bisa memperoleh akses layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Wilayah Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terbagi menjadi 167 Desa dan 5 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
1	Kecamatan Donorojo	1	Sawahan
		2	Kalak
		3	Sendang
		4	Klepu
		5	Gedompol
		6	Cemeng
		7	Gendaran
		8	Sukodono
		9	Sekar
		10	Donorojo
		11	Belah
		12	Widoro
2	Kecamatan Punung	13	Bomo



No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		14	Sooko
		15	Punung
		16	Mendolo Kidul
		17	Piton
		18	Kendal
		19	Wareng
		20	Mantren
		21	Ploso
		22	Mendolo Lor
		23	Kebonsari
		24	Gondosari
		25	Tinatar
3	Kecamatan Pringkuku	26	Dersono
		27	Sugihwaras
		28	Watukarung
		29	Jlubang
		30	Candi
		31	Poko
		32	Dadapan
		33	Pringkuku
		34	Sobo
		35	Ngadirejan
		36	Glinggangan
		37	Pelem
		38	Tamanasri
4	Kecamatan Pacitan	39	Pacitan
		40	Pucangsewu
		41	Sidoharjo
		42	Ploso
		43	Baleharjo
		44	Kembang
		45	Sukoharjo
		46	Kayen
		47	Sirnoboyo
		48	Arjowinangun
		49	Bangunsari
		50	Sedeng
		51	Sumberharjo
		52	Tanjungsari
		53	Menadi
		54	Mentoro
		55	Purworejo
		56	Nanggungan
		57	Widoro



No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		58	Semanten
		59	Sambong
		60	Banjarsari
		61	Bolosingo
		62	Ponggok
		63	Tambakrejo
5	Kecamatan Arjosari	64	Sedayu
		65	Tremas
		66	Arjosari
		67	Gunungsari
		68	Pagutan
		69	Gembong
		70	Borang
		71	Gegeran
		72	Kedungbendo
		73	Mangunharjo
		74	Temon
		75	Karanggede
		76	Karangrejo
		77	Jetis Kidul
		78	Gayuhan
		79	Jatimalang
		80	Mlati
6	Kecamatan Kebonagung	81	Plumbungan
		82	Karangnongko
		83	Kalipelus
		84	Karanganyar
		85	Katipugal
		86	Klesem
		87	Sidomulyo
		88	Worawari
		89	Mantren
		90	Gawang
		91	Kebonagung
		92	Purwoasri
		93	Banjarjo
		94	Sanggrahan
		95	Punjung
		96	Gembuk
		97	Ketro
		98	Ketepung
		99	Wonogondo
7	Kecamatan Nawangan	100	Gondang
		101	Mujing



No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		102	Nawangan
		103	Sempu
		104	Jetis Lor
		105	Tokawi
		106	Penggung
		107	Pakis Baru
		108	Ngromo
8	Kecamatan Bandar	109	Petrungsinarang
		110	Ngunut
		111	Bandar
		112	Kledung
		113	Tumpuk
		114	Watupatok
		115	Bangunsari
		116	Jeruk
9	Kecamatan Tegalombo	117	Kebondalem
		118	Gedangan
		119	Ngreco
		120	Kasihani
		121	Pucangombo
		122	Gemaharjo
		123	Ploso
		124	Tegalombo
		125	Kemuning
		126	Tahunan
		127	Tahunan Baru
10	Kecamatan Tulakan	128	Jetak
		129	Nglaran
		130	Wonoanti
		131	Padi
		132	Kluwih
		133	Bungur
		134	Tulakan
		135	Jatigunung
		136	Gasang
		137	Kalikuning
		138	Ngile
		139	Bubakan
		140	Losari
		141	Ngumbul
		142	Wonosidi
		143	Ketrowonojoyo
		144	Ketroharjo
11	Kecamatan Ngadirojo	145	Sidomulyo



No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		146	Hadiwarno
		147	Hadiluwih
		148	Tanjungpuro
		149	Pagerejo
		150	Wiyoro
		151	Ngadirojo
		152	Cokrokembang
		153	Bodag
		154	Tanjung lor
		155	Nogosari
		156	Cangkring
		157	Bogoharjo
		158	Wonodadi Wetan
		159	Wonodadi Kulon
		160	Wonokarto
		161	Wonosobo
		162	Wonoasri
12	Kecamatan Sudimoro	163	Pager Kidul
		164	Pager Lor
		165	Sukorejo
		166	Sudimoro
		167	Ketanggung
		168	Klepu
		169	Sumber Rejo
		170	Gunung Rejo
		171	Karang Mulyo
		172	Sembowo

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

E. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Tabel 1.5

Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1.	Sekretariat Daerah	PERBUP NO 0190 TAHUN 2021 SALINAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SEKDA.
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PERBUP NO 84 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 154



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PACITAN
3.	Dinas Kesehatan	PERBUP NO 65 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 135 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
4.	Dinas Perikanan	PERBUP NO 79 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 149 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PERBUP NO 80 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR ISO TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN
6.	Dinas Koperasi, UM, dan Perindustrian	PERBUP NO 72 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 142 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
7.	Dinas Perdagangan & Tenaga Kerja	PERBUP NO 73 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PERBUP NO 75 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PERBUP NO 71 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN
10.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	PERBUP NO 76 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
11.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	PERBUP NO 64 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
12.	Badan Keuangan Daerah	PERBUP NO 83 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 153 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
13.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERBUP NO 82 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
14.	Dinas Sosial	PERBUP NO 66 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PERBUP NO 69 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PACITAN
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PERBUP NO 67 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 137 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PERBUP NO 68 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PERBUP NO 85 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN
19.	Inspektorat	PERBUP NO 62 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
20.	Satuan Polisi Pamong Praja	PERBUP NO 70 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 140 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PERBUP NO 81 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN
22.	Dinas Pendidikan	PERBUP NO 63 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
23.	Dinas Perhubungan	PERBUP NO 77 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 147 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PERBUP NO 131 TAHUN 2023 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
25.	Dinas Lingkungan Hidup	PERBUP NO 78 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 148 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
		ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PERBUP NO 74 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 144 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN
27.	Sekretariat DPRD	PERBUP NO 61 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
28.	Kecamatan Donorojo	PERDA NO 09 TAHUN 2021 SALINAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
29.	Kecamatan Punung	
30.	Kecamatan Pringkuku	
31.	Kecamatan Pacitan	
32.	Kecamatan Kebonagung	
33.	Kecamatan Arjosari	
34.	Kecamatan Tegalombo	
35.	Kecamatan Nawangan	
36.	Kecamatan Bandar	
37.	Kecamatan Tulakan	
38.	Kecamatan Ngadirojo	
39.	Kecamatan Sudimoro	



F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintah, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja pemerintah dipengaruhi yang paling utama adalah sumberdaya manusia pegawainya sehingga manajemen kepegawaian sangat penting dan serius ditangani supaya menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional.

Selama tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan dengan Anggaran. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Latihan Dasar CPNS Golongan II/III. Dari target 15 orang terdiri dari 5 Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II terealisasi 4 orang. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) target 5 Orang teralisasi 5 Orang. Sedangkan Latihan Dasar CPNS Golongan II/III ditargetkan 5 orang terealisasi 5 Orang. Adapun Kekurangan target 1 orang karena tidak ada panggilan dari LAN untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II. Karena yang berwenang untuk pelaksanaan Pelatihan tersebut adalah LAN.

Selanjutnya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum, kegiatan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsi, dari Tarjet 38 orang terealisasi sebanyak 42 orang. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum, kegiatan ini diperuntukkan untuk penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat. Dengan Analisa Kebutuhan Diklat dapat disusun prioritas diklat dan pengiriman diklat akan lebih tepat sasaran dan dari segi anggaran akan lebih efisien.

Selama tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan proses kenaikan pangkat sebanyak 6 (enam) periode sebanyak 1100 PNS. Sedangkan untuk pengangkatan CPNS ke PNS diproses sebanyak 5 Orang dari tenaga Auditor. Selain itu proses mutasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebanyak 168 PNS, dan Mutasi Pindah keluar dan masuk Kabupaten Pacitan sebanyak 20 PNS, dengan rincian 9 PNS yang mutasi keluar, 11 PNS yang mutasi masuk ke Kabupaten Pacitan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan Penilaian Kinerja terhadap 84 PNS, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan manajemen talenta sebagai dasar pertimbangan pimpinan untuk melakukan mutasi dan promosi.



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga melaksanakan Evaluasi Penilaian Kinerja ASN. Mulai tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan menggunakan Aplikasi Penilaian Kinerja dari BKN yaitu Ekinerja BKN. Aplikasi Penilaian Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ASN periodik tiap tiga bulan sekali. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pacitan juga memberikan penghargaan karya satya atas pengabdian PNS dengan lama pengabdian 30, 20 dan 10 tahun pada tahun 2024 sebanyak 260 PNS, serta pemberian penghargaan terhadap PNS yang berprestasi di tingkat nasional sebanyak 1 orang.

Tabel 1.6

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintah, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	Urusan	Rincian ASN			
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan	5	2945	1784	4734
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	8	873	140	1021
3	RSUD dr. Darsono	Kesehatan	10	270	39	319
			18	1143	179	1340
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	16	31	58
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Pertanahan.	6	8	10	24
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6	10	17	33
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5	2	5	12
8	Dinas Sosial	Sosial	4	6	12	22
9	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja; Perdagangan; Transmigrasi.	7	10	31	48
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk dan	5	5	4	14



No	Perangkat Daerah	Urusan	Rincian ASN			
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan	Jumlah
	Perlindungan Anak	Keluarga Berencana.				
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pangan; Pertanian.	12	47	76	135
12	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	7	5	36	48
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	9	5	19
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	11	23
15	Dinas Perhubungan	Perhubungan	6	11	18	35
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika; Statistik; Persandian.	6	9	6	21
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Perindustrian.	7	9	5	21
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	3	11	6	20
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Kebudayaan; Pariwisata; Kepemudaan dan Olahraga.	8	7	21	36
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan; Kearsipan.	6	10	7	23
21	Dinas Perikanan	Kelautan Perikanan	6	12	4	22
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan.	7	16	7	30
23	Badan Keuangan	Keuangan	6	14	23	43



No	Perangkat Daerah	Urusan	Rincian ASN			
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan	Jumlah
	Daerah					
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	15	11	33
25	Inspektorat Daerah	Pengawasan	7	22	13	42
26	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	14	30	62	106
27	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	6	10	12	28
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	6	6	7	19
29	Kecamatan Arjosari	Kewilayahan	7		10	17
30	Kecamatan Bandar	Kewilayahan	5		8	13
31	Kecamatan Donorojo	Kewilayahan	5		8	13
32	Kecamatan Kebonagung	Kewilayahan	7		6	13
33	Kecamatan Nawangan	Kewilayahan	4		8	12
34	Kecamatan Ngadirojo	Kewilayahan	6		10	16
35	Kecamatan Pacitan	Kewilayahan	12		10	22
36	Kecamatan Pringkuku	Kewilayahan	8		5	13
37	Kecamatan Punung	Kewilayahan	6		9	15
38	Kecamatan Sudimoro	Kewilayahan	7		4	11
39	Kecamatan Tegalombo	Kewilayahan	6		6	12
40	Kecamatan Tulakan	Kewilayahan	4		14	18
41	Kelurahan Baleharjo	Kewilayahan	3			3
42	Kelurahan Pacitan	Kewilayahan	3			3
43	Kelurahan Ploso	Kewilayahan	2			2
44	Kelurahan Pucangsewu	Kewilayahan	2		1	3
45	Kelurahan Sidoharjo	Kewilayahan	3		2	5
	TOTAL		282	4394	2504	7180



Setiap tahunnya ASN di Kabupaten Pacitan yang pensiun cukup banyak, pada tahun 2024 sebanyak 400 Formasi, terdiri dari 92 Formasi CPNS dan 308 Formasi PPPK, pada tahun 2024 yang pensiun BUP sebanyak 358 orang. Kekurangan ASN di Kabupaten Pacitan akan terus bertambah apabila tidak ada rekrutmen ASN. Pada tahun 2024 melaksanakan rekrutmen ASN untuk tenaga CPNS dan PPPK sebanyak 400 Formasi. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.7
Formasi CPNS

No	Jabatan	Formasi	Pelamar	Lulus Administrasi	Lulus Tes SKD	Lulus Tes SKB
1	Guru	0	0	0	0	0
2	Kesehatan	19	129	122	33	18
3	Teknis	73	1371	1169	193	69
	Total	92	1.500	1.291	226	87

Tabel 1.8
Formasi PPPK

No	Jabatan	Formasi	Pelamar Tahap I	Lulus Administrasi Tahap I	Lulus CAT Tahap I
1	Guru	101	416	409	95
2	Kesehatan	89	156	155	76
3	Teknis	118	1043	1010	106
	Total	308	1.615	1.574	277

Sedangkan sesuai dengan data kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan kondisi Pegawai Negeri Sipil pada akhir Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.9
Jumlah PNS Berdasarkan Usia
Periode Desember 2024

Perangkat Daerah	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	Jumlah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	5	16	9		33
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1	8	10		19
Badan Keuangan Daerah	4	9	23	7		43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2	8	2		12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	16	8		30
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3	4	12		19
Dinas Kesehatan	140	355	315	207		1017
Dinas Ketahanan Pangan dan	5	12	53	65	1	136



Perangkat Daerah	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	Jumlah
Pertanian						
Dinas Komunikasi dan Informatika		3	12	5		20
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian		2	10	9		21
Dinas Lingkungan Hidup			14	34		48
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	5	12	16		36
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	8	20	27		58
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	9	10		23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	1	6	11		20
Dinas Pendidikan	223	1254	1612	1631	13	4733
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		2	7	4		13
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja		1	23	24		48
Dinas Perhubungan	1	6	13	15		35
Dinas Perikanan	1	3	4	14		22
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	9	12		23
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	3	9	9		23
Dinas Sosial	3	1	8	10		22
Inspektorat Daerah	10	5	17	10		42
Kecamatan Arjosari		1	2	14		17
Kecamatan Bandar			5	8		13
Kecamatan Donorojo			7	6		13
Kecamatan Kebonagung		1	4	8		13
Kecamatan Nawangan			7	4		11
Kecamatan Ngadirojo			6	10		16
Kecamatan Pacitan		4	4	14		22
Kecamatan Pringkuku			5	8		13
Kecamatan Punung		1	4	10		15
Kecamatan Sudimoro			4	7		11
Kecamatan Tegalombo		1	2	9		12
Kecamatan Tulakan			4	14		18
Kelurahan Baleharjo			1	1		2
Kelurahan Pacitan			1	2		3
Kelurahan Ploso		1		1		2
Kelurahan Pucangsewu			1	2		3
Kelurahan Sidoharjo			3	2		5
RSUD dr. Darsono	10	91	150	70		321
Satuan Polisi Pamong Praja		6	11	21		38
Sekretariat Daerah	13	15	51	25		104
Sekretariat DPRD		4	16	13		33
Jumlah	429	1812	2516	2410	14	7181



Kelompok usia 40 – 49 tahun masih mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia, disusul dengan kelompok usia 50 – 59 tahun. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan mayoritas PNS di Kabupaten Pacitan berusia diatas 40 tahun. Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan presentase usia produktif PNS pada Pemerintah Kabupaten Pacitan di atas usia 40 tahun masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia muda atau di bawah 40 tahun.

Dengan adanya perbedaan usia yang jauh tersebut, menjadi tantangan bagi PNS generasi muda untuk dapat melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan masyarakat dengan jumlah PNS yang terbatas. Birokrasi harus siap melakukan regenerasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal

Tabel 1.10
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode Desember 2024

Perangkat Daerah	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	15	33
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11	8	19
Badan Keuangan Daerah	24	19	43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	2	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	18	30
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	9	19
Dinas Kesehatan	234	783	1017
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	76	59	135
Dinas Komunikasi dan Informatika	14	6	20
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	10	11	21
Dinas Lingkungan Hidup	41	7	48
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25	11	36
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48	10	58
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	11	23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	20
Dinas Pendidikan	2125	2608	4733
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	5	8	13
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	41	7	48
Dinas Perhubungan	30	5	35
Dinas Perikanan	15	7	22
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	10	23
Dinas Perumahan, Kawasan	18	5	23



Perangkat Daerah	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Permukiman dan Pertanahan			
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		1	1
Dinas Sosial	8	14	22
Inspektorat Daerah	20	22	42
Kecamatan Arjosari	10	7	17
Kecamatan Bandar	10	3	13
Kecamatan Donorojo	9	4	13
Kecamatan Kebonagung	9	4	13
Kecamatan Nawangan	8	3	11
Kecamatan Ngadirojo	10	6	16
Kecamatan Pacitan	16	6	22
Kecamatan Pringkuku	11	2	13
Kecamatan Punung	12	3	15
Kecamatan Sudimoro	9	2	11
Kecamatan Tegalombo	7	5	12
Kecamatan Tulakan	15	3	18
Kelurahan Baleharjo	1	1	2
Kelurahan Pacitan	2	1	3
Kelurahan Ploso		2	2
Kelurahan Pucangsewu	2	1	3
Kelurahan Sidoharjo	4	1	5
RSUD dr. Darsono	131	190	321
Satuan Polisi Pamong Praja	26	12	38
Sekretariat Daerah	61	43	104
Sekretariat DPRD	22	11	33
(blank)			
Grand Total	3205	3974	7181

Berdasarkan gender, PNS pada Pemerintah Kabupaten Pacitan per Desember 2024 jumlah PNS laki-laki sebanyak 3.205 atau 44,64% sedangkan jumlah PNS wanita 3.974 atau sekitar 55,36%.

Tabel 1.11
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang
Periode Desember 2024

Perangkat Daerah	PNS					PPPK				
	I	II	III	IV	Total	IX	V	VII	X	Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	4	20	5	29	4				4
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	3	11	5	19					0
Badan Keuangan Daerah	0	6	32	5	43					0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	6	2	9	2				2
Badan Perencanaan	0	2	19	5	26	3		1		4



Perangkat Daerah	PNS					PPPK				
	I	II	III	IV	Total	IX	V	VII	X	Total
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	11	5	17	1		1		2
Dinas Kesehatan	2	285	527	45	859	17		136	5	158
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	11	57	9	78	40	11	4	3	58
Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	11	6	18	2				2
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	0	4	11	6	21					0
Dinas Lingkungan Hidup	0	13	31	4	48					0
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0	7	21	5	33	2		1		3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	9	32	7	48	9		1		10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	4	13	5	22	1				1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	12	5	18	1		1		2
Dinas Pendidikan	5	292	2109	700	3106	1627				1627
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0	3	5	4	12			1		1
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	0	8	32	7	47	1				1
Dinas Perhubungan	0	9	21	4	34	1				1
Dinas Perikanan	0	1	12	6	19	2		1		3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	14	5	20	2		1		3
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	1	16	4	21			2		2
Dinas Sosial	0	6	12	2	20	2				2
Inspektorat Daerah	0	8	21	13	42					0
Kecamatan Arjosari	1	4	10	2	17					0
Kecamatan Bandar	0	5	7	1	13					0
Kecamatan Donorojo	0	6	6	1	13					0
Kecamatan Kebonagung	0	5	6	2	13					0
Kecamatan Nawangan	0	6	3	2	11					0
Kecamatan Ngadirojo	0	7	5	4	16					0
Kecamatan Pacitan	1	6	13	2	22					0
Kecamatan Pringkuku	0	5	5	3	13					0
Kecamatan Punung	0	6	8	1	15					0
Kecamatan Sudimoro	0	3	6	2	11					0
Kecamatan Tegalombo	0	6	4	2	12					0
Kecamatan Tulakan	0	11	5	2	18					0



Perangkat Daerah	PNS					PPPK				
	I	II	III	IV	Total	IX	V	VII	X	Total
Kelurahan Baleharjo	0	0	2	0	2					0
Kelurahan Pacitan	0	0	3	0	3					0
Kelurahan Ploso	0	0	2	0	2					0
Kelurahan Pucangsewu	0	0	3	0	3					0
Kelurahan Sidoharjo	0	2	3	0	5					0
RSUD dr. Darsono	0	42	234	41	317			3	1	4
Satuan Polisi Pamong Praja	0	10	19	7	36	1		1		2
Sekretariat Daerah	0	17	63	13	93	9		2		11
Sekretariat DPRD	0	6	20	6	32	1				1
Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	1					0
TOTAL	10	828	3484	955	5277	1728	11	156	9	1904



F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD TA 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD; tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
6. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 13 Desember 2023 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 12 September 2024 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2024. Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut :



Tabel 1.12
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	51.299.355,80	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
5.1	BELANJA OPERASI	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31
5.2	BELANJA MODAL	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
5.4	BELANJA TRANSFER	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	99,75
	Jumlah Belanja	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
	<u>SURPLUS/(DEFISIT)</u>	-116.508.846.101,00	-59.136.192.996,18	50,76
6	PEMBIAYAAN DAERAH	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
	<u>PEMBIAYAAN NETTO</u>	175.227.284.712,00	118.316.080.101,45	101,55
	<u>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</u>	0,00	59.179.887.105,27	0,00

H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang membuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.13
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang membuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
101	Pendidikan			607.726.417.289,00	589.691.417.625,80
	1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	484.685.909.611,00	472.443.135.110,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	2	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112.692.615.308,00	107.629.634.510,80
	3	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	20.000.000,00	18.776.900,00
	4	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.018.400.000,00	9.293.956.005,00
				56.30	56.40
	5	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000,00	9.864.000,00
102	Kesehatan			346.922.247.189,00	335.721.110.394,70
	1	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.283.145.169,00	91.069.679.306,00
	2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.701.667.147	54.662.432.595
	3	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.287.115.252,00	4.215.767.557,00
	4	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	495.844.000,00	466.599.030,00
	5	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.772.881.341	1.754.704.300
	1	RSUD dr. Darsono	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.806.334.024,00	119.105.756.936,08
	2	RSUD dr. Darsono	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.500.000.000,00	5.175.072.880,00
	3	RSUD dr. Darsono	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.788.800.000	1.733.300.000



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			150.088.639.330	145.473.620.379
	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.370.427.119,00	11.788.170.189,00
	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.989.787.377,00	12.588.654.133,00
	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.240.404.377,00	12.078.908.083,00
	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	104.500.000,00	103.927.785,00
	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	390.960.000,00	389.563.233,00
	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.216.743.623,00	3.176.252.602,00
	7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.016.735.000,00	6.009.997.014,00
	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.686.358.610,00	4.652.695.028,00
	9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.040.402.390,00	2.749.957.301,00
	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93.751.625.834,00	90.680.746.716,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	30.695.000,00	26.631.145,00
	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.250.000.000,00	1.228.117.150,00
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			42.053.659.104,00	41.412.497.326,64
	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.833.921.800,00	5.523.560.548,00
	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	317.234.175,00	313.090.350,00
	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.759.029.325,00	1.754.076.200,00
	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	282.030.000,00	279.257.500,00
	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	33.861.443.804,00	33.542.512.728,64
105	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			16.329.804.738,00	15.846.137.859,00
	1	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.674.465.607,00	6.402.529.731,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	2	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.979.576.484,00	3.962.245.266,00
	3	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	650.000.000,00	647.174.449,00
	1	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.730.672.122,00	2.568.608.294,00
	2	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.295.090.525,00	2.265.594.009,00
106	Sosial			14.025.195.057,00	12.907.081.721,50
	1	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.183.467.857,00	3.847.194.197,00
	2	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	534.200.000,00	524.271.022,00
	3	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	722.400.000,00	714.022.700,00
	4	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.309.479.700,00	7.551.448.340,00
	5	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	180.647.500,00	175.214.900,00
	6	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	95.000.000,00	94.930.562,50
207	Tenaga Kerja			3.242.503.480,00	3.224.959.774,00
	1	Dinas Perdagangan dan Tenaga	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30.000.000,00	29.683.800,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Kerja			
	2	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.807.503.480,00	2.792.836.054,00
	3	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.000.000,00	167.769.320,00
	4	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	235.000.000,00	234.670.600,00
208	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.128.600.000,00	1.106.825.554,00
	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	530.000.000,00	525.556.131,00
	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	55.600.000,00	55.120.000,00
	3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	45.000.000,00	42.856.200,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Perlindungan Anak			
	4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000,00	9.340.400,00
	5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	172.590.000,00	168.568.000,00
	6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.000.000,00	305.384.823,00
209	Pangan			480.190.000,00	464.580.050,00
	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	61.100.000,00	57.444.400,00
	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	369.090.000,00	358.164.450,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.000.000,00	29.480.800,00
	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000,00	19.490.400,00
210	Pertanahan			6.395.352.145,00	6.127.454.669,00
	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	165.001.085,00	115.889.450,00
	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00
	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	634.707.060,00	579.052.589,00
211	Lingkungan Hidup			15.952.561.930,00	15.392.270.716,90
	1	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.983.441.630,00	6.743.410.659,00
	2	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	621.079.000,00	573.797.556,00
	3	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	247.411.000,00	241.083.160,00
	4	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.278.233.000,00	2.258.717.440,75
	5	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.550.000,00	61.605.000,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	6	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	120.830.000,00	117.361.080,00
	7	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.000.000,00	23.158.000,00
	8	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.000.000,00	43.678.800,00
	9	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000,00	52.035.200,00
	10	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.504.017.300,00	5.277.423.821,15
212	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4.933.972.128,00	4.730.698.315,63
	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.535.771.128,00	4.340.142.823,63
	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	105.200.000,00	103.427.586,00
	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100.000.000,00	98.807.471,00
	4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	168.296.000,00	166.786.435,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.705.000,00	21.534.000,00
213	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			10.816.204.928,00	10.374.355.387,00
	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.797.407.000,00	3.675.155.245,00
	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	150.064.000,00	148.414.673,00
	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	151.200.000,00	150.902.410,00
	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.189.033.928,00	4.874.014.626,00
	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.528.500.000,00	1.525.868.433,00
214	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			15.328.802.845,00	14.930.390.922,00
	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.458.015.095,00	2.399.571.464,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	360.976.600,00	319.491.330,00
	3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.038.387.750,00	8.763.375.148,00
	4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.471.423.400,00	3.447.952.980,00
215	Perhubungan			7.959.859.059,00	7.681.364.568,38
	1	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.220.195.059,00	4.997.521.528,00
	2	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.739.664.000,00	2.683.843.040,38
216	Komunikasi dan Informatika			6.806.726.517,00	6.597.195.446,00
	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.451.860.017,00	4.264.072.919,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
			KABUPATEN/KOTA		
	2	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	887.000.000,00	881.313.951,00
	3	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.467.866.500,00	1.451.808.576,00
217	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			5.693.635.471,00	5.558.644.046,00
	1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.562.345.471,00	3.431.521.605,00
	2	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.000.000,00	24.904.760,00
	3	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.000.000,00	39.941.330,00
	4	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.000.000,00	29.882.450,00
	5	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	299.332.200,00	298.920.846,00
	6	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	127.500.000,00	127.128.222,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	7	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.485.916.800,00	1.483.200.733,00
	8	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	123.541.000,00	123.144.100,00
218	Penanaman Modal			4.942.511.518,00	4.743.044.817,00
	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.980.044.518,00	3.803.731.087,00
	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	5.000.000,00	4.764.000,00
	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	35.000.000,00	34.647.500,00
	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	76.563.000,00	76.162.730,00
	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	835.942.000,00	813.817.800,00
	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.962.000,00	9.921.700,00
219	Kepemudaan dan Olahraga			5.905.000.000,00	5.895.331.492,00
	1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	700.000.000,00	699.749.640,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		dan Olahraga			
	2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.805.000.000,00	4.795.581.902,00
	3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000,00	399.999.950,00
220	Statistik			330.000.000,00	328.765.050,00
	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	330.000.000,00	328.765.050,00
221	Persandian			6.642.000,00	6.341.200,00
	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.642.000,00	6.341.200,00
222	Kebudayaan			3.477.020.000,00	3.441.458.336,00
	1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.245.000.000,00	2.236.804.725,00
	2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	463.320.000,00	461.323.400,00
	3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	468.700.000,00	461.782.211,00
	4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000,00	190.812.500,00
	5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100.000.000,00	90.735.500,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Olahraga			
223	Perpustakaan			3.812.238.395,00	3.721.954.026,50
	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.275.578.395,00	3.190.953.612,00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	536.660.000,00	531.000.414,00
224	Kearsipan			247.100.000,00	243.738.724,00
	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	240.845.000,00	238.354.424,00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.255.000,00	5.384.300,00
325	Kelautan dan Perikanan			7.643.588.412,00	7.531.726.658,00
	1	Dinas Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.362.377.912,00	4.273.452.745,00
	2	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.633.914.000,00	1.623.687.130,00
	3	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.057.494.500,00	1.045.605.683,00
	4	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	589.802.000,00	588.981.100,00
326	Pariwisata			21.149.478.584,00	19.901.687.185,30
	1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.460.685.109,00	5.959.434.128,00
	2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.804.926.000,00	10.246.272.690,30



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Olahraga			
	3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.383.349.975,00	1.311.336.350,00
	4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.500.517.500,00	2.384.644.017,00
327	Pertanian			30.536.997.803,00	28.835.748.856,00
	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.659.512.603,00	13.916.396.055,00
	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.659.682.700,00	7.981.815.542,00
	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.517.802.500,00	5.464.233.720,00
	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	75.000.000,00	64.094.200,00
	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75.000.000,00	73.632.500,00
	6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	15.000.000,00	13.288.950,00
	7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.535.000.000,00	1.322.287.889,00
330	Perdagangan			11.623.013.505,00	11.349.681.936,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	1	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.320.313.137,00	8.101.288.773,00
	2	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000,00	67.891.975,00
	3	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.574.700.368,00	2.524.571.488,00
	4	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	175.000.000,00	173.557.000,00
	5	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	312.265.000,00	312.200.000,00
	6	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	78.000.000,00	77.693.700,00
	7	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	92.735.000,00	92.479.000,00
331	Perindustrian			640.000.000,00	632.078.187,00
	1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	631.000.000,00	623.181.327,00
	2	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.000.000,00	8.896.860,00
332	Transmigrasi			5.000.000,00	4.756.000,00
	1	Dinas Perdagangan dan Tenaga	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5.000.000,00	4.756.000,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Kerja			
502	Keuangan			323.819.608.426,00	318.473.614.610,00
	1	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.272.777.563,00	22.228.831.282,00
	2	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	296.362.492.363,00	292.087.608.080,00
	3	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.072.000.000,00	1.051.007.611,00
	4	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.112.338.500,00	3.106.167.637,00
501	Perencanaan			9.700.934.694,00	9.256.913.499,00
	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.637.136.999,00	5.268.544.959,00
	2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.828.797.695,00	1.769.027.850,00
	3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.235.000.000,00	2.219.340.690,00
503	Kepegawaian			6.152.450.365,00	5.740.265.619,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	1	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.567.874.365,00	4.413.989.897,00
	2	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.584.576.000,00	1.326.275.722,00
504	Pendidikan dan Pelatihan			955.000.000,00	928.932.297,00
	1	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	955.000.000,00	928.932.297,00
505	Penelitian dan Pengembangan			1.050.000.000,00	1.047.325.370,00
	1	Badan Perencanaa n Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.050.000.000,00	1.047.325.370,00
401	Sekretariat Daerah			41.541.216.310,00	39.326.633.613,00
	1	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.208.934.994,00	31.787.199.212,00
	2	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.080.000.000,00	4.545.882.476,00
	3	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.252.281.316,00	2.993.551.925,00
402	Sekretariat DPRD			56.131.381.630,00	54.111.157.879,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	1	Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.033.106.706,00	31.086.913.083,00
	2	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.098.274.924,00	23.024.244.796,00
601	Inspektorat			9.373.522.914,00	8.883.250.049,74
	1	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.692.178.414,00	7.321.461.806,74
	2	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.131.730.000,00	1.085.314.373,00
	3	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	549.614.500,00	476.473.870,00
801	Kesatuan Bangsa dan Politik			42.574.666.963,00	42.301.761.360,00
	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.396.279.608,00	3.176.089.293,00
	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAA	1.083.000.000,00	1.079.765.080,00
	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDID	30.536.767.355,00	30.532.114.081,00
	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT	270.000.000,00	268.244.500,00
	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIA	55.000.000,00	54.531.000,00



NO	URUSAN	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KU	7.233.620.000,00	7.191.017.406,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga disesuaikan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Isu strategis di Kabupaten Pacitan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut, untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pembangunan Insfrastuktur Strategis
Pengungkit Ekonomi Kabupaten Pacitan

Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses transportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tercatat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah sebesar 66,78% dari target akhir 2021 mencapai 65,93% sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2020



adalah 93,54 dengan target akhir adalah 93,63%. Infrastruktur tidak hanya dituntut untuk terpenuhi saja tetapi bagaimana konektivitasnya bisa terjamin dalam rangka menggerakkan ekonomi berbasis potensi unggulan khususnya disektor pariwisata dan pertanian. Dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan, kemudahan, dan konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Selain itu Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Pacitan.

2. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten Pacitan sebagai kawasan pesisir dan rawan longsor, maka dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola mitigasi bencana. Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara berkala serta menghidupkan kembali SISKLAMING dan Perondaan di lingkungan RT. Selain itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis komunitas juga menjadi alternatif strategi dalam rangka mewujudkan ketahanan daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang.

3. Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan Sebagai Magnet Investasi Untuk Menyerap Tenaga Kerja Dan Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata memiliki proporsi sebesar 10,87% yang artinya dengan angka tersebut maka perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bentuk kemandirian daerah agar tidak berketergantungan pada pemerintah pusat. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PAD adalah dengan mengupayakan peningkatan sektor unggulan .

Dalam hal ini Kabupaten Pacitan memiliki potensi di bidang Pariwisata. Pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pariwisata dengan pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu potensi pertanian juga menjadi aspek yang cukup penting yang bisa dikembangkan melalui pertanian berbasis kawasan agar masyarakat petani dapat terlibat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan masyarakat petani yang mempunyai potensi untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kebutuhan produksi pertanian masyarakat. Kemudian juga perlu didukung oleh kemudahan dan peluang investasi bagi investor dalam rangka pemenuhan fasilitas pendukung serta



pembangunan pada kawasan wisata dan pertanian. Dengan demikian maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan pajak daerah.

4. Pentingnya Penguatan Kapasitas Petani, Nelayan Dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Dalam Menyongsong Industri 4.0

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek kehidupan untuk berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan perkembangan jaman, sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi, penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu di tingkatkan guna meningkatkan efektifitas produksi pertanian. Pertumbuhan produktivitas padi dan bahan utama sektor lainnya tercatat memiliki tren yang meningkat namun belum signifikan yakni meningkat sebesar 0,35

KW/HA, sektor perikanan kelompok nelayan memiliki fluktuasi pada nilai produksinya, tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun meningkat pada tahun 2020. Wisatawan baik lokal maupun manca negara rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup dinamis terkait kemajuan teknologi sehingga pelaku usaha pada sektor pariwisata juga dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong industri 4.0 yakni kombinasi antara mekanisme mesin, kecerdasan buatan dan konektivitas internet. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan ini juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, dimana untuk Kabupaten Pacitan termasuk dalam skema percepatan pembangunan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan dengan fokus pada pengembangan produk unggulan pertanian berupa kopi, kakao, dan biofarmaka.

5. Tuntutan Terciptanya Kondusif Lingkungan Yang Aman Dan Tertib

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga terwujud



harmonisasi sosial. Dalam rangka menjamin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat maka perlu didukung sumber daya aparatur yang berkualitas dan kapabel demi tercapainya stabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

6. Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Permasalahan utama dan tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah pemerataan standart pendidikan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang bermacam-macam. Dalam rangka menjamin pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasana pendidikan melauai standarisasi akreditasi serta mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran berbasis digital.

7. Belum Optimalnya Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Integritas Pendidikan Formal Dan Kebangsaan

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu besar aspek pendidikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini menyusul adanya dampak globalisasi yang mulai mengikis budaya dan karakter bangsa, terfokusnya pendidikan pada bidang ilmu pengetahuan berdampak pada terkesampingnya nilai-nilai karakter sehingga generasi muda cenderung kurang memperhatikan norma sosial, budaya dan agama. Oleh karenanya pendidikan karakter harus tetap di tekankan agar dapat menciptakan generasi yang berwawasan tinggi melalui pendidikan formal serta berbudi luhur melalui pendidikan karakter.

8. Tuntutan Peningkatan Standart Kualitas Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari rasio puskesmas dan pustu persatuan penduduk serta rasio rumah sakit per satuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang belum menunjukan peningkatan, sedangkan untuk Rumah sakit di Kabupaten Pacitan masih berada pada tipe C. Peningkatan akses layanan dan mutu kesehatan kepada seluruh masyarakat Pacitan sangat penting untuk menjamin kualitas Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan harus ditingkatkan. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempersiapkan layanan berbasis digital dan mendekatkan



pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sarana kesehatan baik dari level rumah sakit, puskesmas,ustu dan posyandu. Disisi yang lain kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

9. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan 14,54% berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 11,09% angka tersebut ditunjang oleh tingginya jumlah PPKS. Solusi pada permasalahan kemiskinan adalah memberi bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Selain itu harus di dukung oleh validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah secara bertahap.

10. Keberpihakan Pada Keberdayaan Dan Perlindungan Pada Perempuan, Anak Serta Penyandang Disabilitas

Perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan pernikahan dini dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Rasio KDRT di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Sehingga diperlukan upaya peningkatan advokasi dan pengarusutamaan gender dan anak. Keberpihakan pada disabilitas dan perempuan dalam rangka keberdayaan secara sosial dan ekonomi dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

11. Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Hadirnya Pemerintah

Isu Pelayanan akan tetap ada dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Upaya untuk menjawab hal tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi-inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk mendukung inovasi pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat maka pemerintah perlu melakukan breakdown pelayanan di level setidaknya di level desa agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemanfaatan media Big Data atau One Data masih menjadi isu yang cukup berkembang di Pemerintahan daerah. Selain itu sistem tatakelola pemerintahan di Kabupaten Pacitan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Indeks reformasi birokrasi menjadi cerminan kualitas pelayanan publik



dan profesionalitas kinerja sumberdaya aparatur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah. Peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi mutlak harus dilakukan agar bisa responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mengarahkan system pemerintahan yang berbasis teknologi (E-Government). Salah satu upaya yang dapat didorong adalah melalui penguatan dan integrasi antar pemerintah utamanya pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki hubungan secara langsung terhadap berbagai permasalahan di masyarakat.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995 Kabupaten Pacitan mempunyai semboyan **"TATA PRAMANA HARGENG PRAJA"** yang mengandung makna filosofis tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur Tata Tentrem Kerto Raharjo dengan kondisi wilayah berbukit-bukit selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 disebutkan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pacitan guna menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 20 tahun ke depan. Untuk memudahkan dalam menentukan arah pembangunan dan mampu menjangkau segenap aspek kehidupan, maka arah pembangunan di Kabupaten Pacitan 20 tahun diarahkan melalui strategi Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Pacitan.

Adapun Visi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah "Kabupaten Pacitan yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai Nilai Agama dan Budaya" Keberhasilan pencapaian visi tersebut ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Misi Jangka Panjang

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktivitas Ekonomi yang Stabil;
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Guna memberikan arahan pelaksanaan yang lebih



jelas perlu ditentukan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan (RPJMD) dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok Kepala Daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan.

Periode saat ini memasuki pembangunan tahap IV (2021-2026) yaitu Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Timur dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Timur, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata, sehingga menjadi kabupaten berbasis industri pertanian, kelautan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang di gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya

Sejalan dengan arah pembangunan Lima Tahunan Tahap 4 maka ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah serta mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka ditetapkan visi Kabupaten Pacitan periode 2021 – 2026. Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021 – 2026 adalah “MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

Apabila dijabarkan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin.

Misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;



- 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
- 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
- 4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka berikut adalah gambaran konstruksi dalam pencapaian Visi Pembangunan melalui 4 (empat) misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pacitan periode tahun 2021-2026:

Gambar 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026



Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” maka harus terbangun 2 Pilar Utama yaitu pertumbuhan ekonomi sektor unggulan (misi 3) dan Pembangunan dan peningkatan daya saing SDM (misi 2). Tercapainya 2 Pilar Utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan. Pondasi utama adalah terkait dengan misi ke 1 yaitu Pemerataan Pembangunan Infrastuktur. Setelah itu sebagai pondasi utama adalah pemerintahan yang inovatif, profesional dan melayani.

Misi kesatu dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan



Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi kedua dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Misi ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Misi keempat dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia" dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan tercapai dengan indikator kinerja yang dibagi menjadi 5 (lima) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Urusan Pilihan, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Urusan Penunjang.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Sedangkan tolok ukur yang digunakan adalah :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Angka Kemiskinan
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Indeks Reformasi Birokrasi

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. PDRB Perdagangan Besar dan Eceran
3. PDRB Industri Pengolahan
4. Pengeluaran Perkapita
5. Pendapatan Perkapita

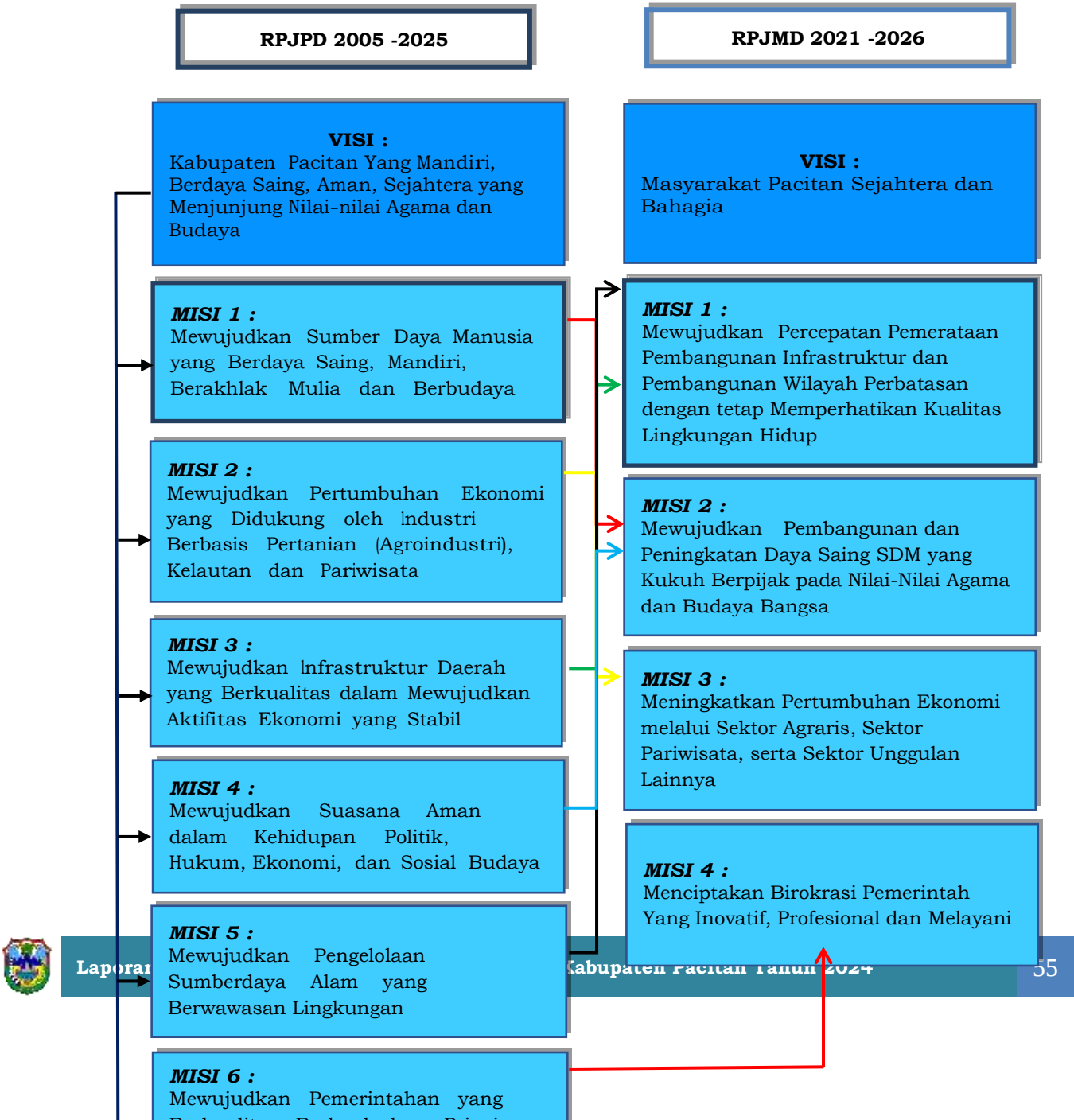


- 6. Indeks Gini
- 7. Persentase Pertumbuhan PAD
- 8. Indeks Pendidikan
- 9. Indeks Kesehatan
- 10. Indeks Infrastruktur
- 11. Indeks Kebahagiaan
- 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 14. Persentase Desa Mandiri
- 15. Indeks Daya Saing Pariwisata
- 16. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
- 17. Nilai Sakip
- 18. Opini BPK
- 19. Maturitas SPIP
- 20. Indeks Profesionalitas Aparatur
- 21. Indeks SPBE
- 22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambaran keselarasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD 2005-2025 sebagaimana gambar 1.2 berikut

Gambar 1.2

Keterkaitan Visi Misi RPJPD dan Visi Misi RPJMD



Keterkaitan Visi Misi RPJPD dan Visi Misi RPJMD dijelaskan berdasarkan Gambar 1.2 sebagaimana contoh salah satunya Misi I “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya” pada RPJPD 2005-2025 berkaitan dengan Misi II ‘Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa’ pada RPJMD 2021-2026 dan selanjutnya Misi II s/d Misi VI pada RPJPD 2005-2025 saling berkaitan dengan Misi I s/d Misi IV RPJMD 2021-2026 sebagaimana Gambar 1.2.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup”, maka tujuan pembangunan adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil” dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas.
- b. Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa”, maka tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Bahagia, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya Kualilitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan.
 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
 3. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat.
 4. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan.
 5. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat.
- b. Tujuan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, dengan sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya”, maka tujuan yang ditetapkan adalah “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan” dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.
3. Meningkatnya daya Saing Pariwisata
4. Meningkatnya Nilai Investasi.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani”, maka tujuan yang ditetapkan adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif” dengan sasaran sebagai berikut:



1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
2. Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan
4. Meningkatnya Kemandirian Desa

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026

Dalam visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi program unggulan pembangunan daerah dengan mencermati, menganalisis dan memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”. Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2021-2026 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain. Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu :

1. Misi Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Penyelenggaraan Jalan.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. Misi Mewujudkan Pembangunan Dan Peningkatan Daya Saing Sdm Yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Bangsa.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan



2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Pemberdayaan Sosial
9. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3. Misi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dari Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Pengembangan UMKM
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Promosi Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pelayanan Penanaman Modal
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9. Program Pemasaran Pariwisata
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Penyuluhan Pertanian
15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4. Misi Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Pengawasan
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Program Kepegawaian Daerah
10. Program Penataan Desa
11. Program Peningkatan Kerjasama Desa
12. Program Administrasi Pemerintahan Desa
13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 1.14
Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan RKPD Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	SKPD
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Program Pengembangan IJMKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindustrian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Mas arakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Program Peumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemijkiman Dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	SKPD
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	SKPD
	Kebudayaan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
5	Memperkuat Infastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindustrian
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindustrian
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Programn Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Becana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Memperkuat Stabilitas Politilk, Hükm dan Keamananana dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG p RAJA



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 dilihat dengan perencanaan pembangunan yang memprioritaskan penanganan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

B. Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 2) Permedagri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 3) Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah.
- 4) Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5) Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.
- 6) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- 7) Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / / KPTS / 408.12/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan.

C. Kebijakan Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026., kebijakan dan program diarahkan untuk pencapaian Visi Kabupaten Pacitan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa jenis layanan dasar, sedangkan program yang tidak terkait langsung merupakan urusan pilihan dan potensial dikembangkan di Kabupaten Pacitan.



Adapun program – program dan kegiatan yang diarahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk pencapaian target SPM tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.14
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengeloaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

Tabel 1.15
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Tabel 1.16
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	



Tabel 1.17
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
 Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan

Tabel 1.18
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
 Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Tahun 2024

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD Kabupaten Pacitan
3	Program	1. Pencegahan,	Satuan Polisi



NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Pamong Praja Kabupaten Pacitan

Tabel 1.19
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2024

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
2	Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan lain, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan bersifat mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing bidang.



BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro adalah gambaran secara umum keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Pendapatan per Kapita. Indikator tersebut adalah dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pihak Swasta dan Pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro pemerintah daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2023 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN	
		2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,94	71,49
2	Angka Kemiskinan (%)	13,65	13,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,83	1,56
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46	4,34
5	Pendapatan per kapita (rupiah / tahun)	33.149.000	35.096.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,352	0,327

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 mencapai 71,49, meningkat 0,55 poin atau 0,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,94. Selanjutnya Angka Kemiskinan dengan kondisi tahun 2023 sejumlah 13,65% dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2024 mencapai 13,08% atau mengalami penurunan sebesar 0,57%. Penurunan



tersebut akibat adanya upaya menstabilkan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang terus dilakukan setia tahunnya. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2023 mencapai 1,83% sedangkan angka pengangguran terbuka pada tahun 2024 sebesar 1,56% atau mengalami penurunan sebesar 0,27%. Hal ini disebabkan tumbuhnya sektor UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,34%, atau mengalami perlambatan sebesar 0,12 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,64 %. Kemudian untuk pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebesar Rp. 33.149.000,00 sedangkan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 35.090.000,00 atau naik sebesar Rp.1.941.000 dan terakhir nilai ketimpangan pendapatan (gini ratio) pada tahun 2024 sebesar 0,327 % atau mengalami penurunan sebesar 0,025 % dibanding tahun 2023 sebesar 0,352%.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan tujuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya tugas pembantuan dan pemberian otonomi secara luas. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas -luasnya. Pemberian otonomi secara luas serta adanya tugas pembantuan, memberikan konsekuensi bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena



itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPD) kepada masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/ kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing - masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Adapun dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, secara teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, format laporan Kepala Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar



sebanyak 6, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebanyak 18, Urusan Pilihan sebanyak 6 dan Urusan Penunjang Pemerintahan sebanyak 5.



2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian Kinerja Kunci setiap urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci

NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(13,296 / 13,414) = 99.1203 %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(41,771 / 41,893) = 99.7088 %	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100%	(24,073 / 24,433) = 98.5266 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(585 / 3,716) = 15.7427 %	
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	(482 / 594,071) = 0.0811 %	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten/Kota	(20 / 20) = 100 %	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	(4,961 / 4,961) = 100 %	capaian dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan kemungkinan belum update data terakhir, data dukung belum sesuai template



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	(4,961 / 4,961) = 100 %	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	(4,901 / 4,901) = 100 %	data dukung belum sesuai tempate, mohon untuk dilengkapi
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	(27,821 / 27,821) = 100 %	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	(64,980 / 64,980) = 100 %	
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	(327,695 / 327,695) = 100 %	
		13	Persentase warga negara usia	Jumlah warga Negara usia 60 tahun	(108,763 / 108,763) = 100 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	(114,281 / 114,281) = 100 %	data dukung belum sesuai tempate, mohon untuk dilengkapi
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	(10,017 / 10,017) = 100 %	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	(973 / 973) = 100 %	data sudah sesuai, namun agar di update apabila ada data terbaru karena capaian msh dibawah th 2023
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(4,980 / 4,980) = 100 %	data dukung belum sesuai tempate, mohon untuk



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota		dilengkapi (perincian tiap gendernya)
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV Di Kabupaten/Kota	(6,984 / 6,984) = 100 %	data dukung belum sesuai tempate, mohon untuk dilengkapi (perincian tiap gendernya)
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	(1,167.21 / 1,439.22) = 81.1002 %	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m2) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m2)	(9.69 / 30.51) = 31.7601 %	
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh	(5,448 / 8,274) = 65.8448 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			yang dilayani oleh jaringan irigasi	jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota		
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut	(118,207 / 147,142) = 80.3353 %	
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	(143,856 / 147,277) = 97.6772 %%	
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	(91 / 106) = 85.8491 %	data pendukung (hasil inspeksi) belum terlampir mohon dilengkapi



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$(839.35 / 1,374) = 61.0881 \%$	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$(48 / 48) = 100 \%$	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	$(107 / 107) = 100 \%$	
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun (N-1)}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun (N-1)}} \times 100\%$	$(10 / 10) = 100 \%$	
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$(4.33 / 20.8) = 20.8173 \%$	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	(14,546 / 165,941) = 8.7658 %	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Unit Rumah Kabupaten/Kota	(299 / 299) = 100 %	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	(120 / 120) = 100 %	Jumlah Pengaduan yang ditangani dan Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	(40 / 40) = 100 %	40 Jenis Perda dan Perkada yang ditegakkan dan memuat sanksi
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak ----- X 100% Jumlah warga negara yang memeperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	(5,938 / 5,938) = 100 %	hasil capaian tahun 2023 terhadap 2024 mengalami penurunan, kemungkinan data belum di update dimohon untuk melengkapi



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(5,938 / 5,938) = 100 %	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- -----100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	(324 / 401) = 80.7980 %	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	(37 / 37) = 100 %	Terdapat 37 kejadian dalam tahun 2024



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	15 Menit	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	(1,709 / 1,709) = 100 %	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	(84 / 84) = 100 %	
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	(5 / 5) = 100 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga keseluruhan	(179 / 3,537) = 5.0608 %	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	(194,905.5 Ket. A / 3,537 Ket. B) = 55.1047 Ket. D	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	(3 / 18) = 16.6667 %	
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	(722 / 722) = 100 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	(21,624,015,165 / 112,567,002,943) = 19.2099 %	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi	(12 / 12) = 100 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				----- x 100% Jumlah Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	(16 Orang / 293,910 Orang) x 100,000 Rasio = 5.4438	
9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	(102.24 / 14.52) = 704.1322 %	
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	(6,000,544.01 / 6,000,544.01) = 100 %	
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (7 / 7) = 100 %	
		53	Tersedianya Lokasi	Luas tanah yang telah dimanfaatkan	(0.1 / 0.1) = 100 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan		
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar semua dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Jumlah penerima Tanah Obyek Lanreform (1 / 1) = 100 %	
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	Tidak ada permohonan ijin membuka tanah	
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Tidak ada laporan sengketa lahan	
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	64.92 = (0,376 x 52,50) + (0,405 x 92,06) + (0,219 x 36,05) Indeks Kualitas Pencemaran Air 52,50	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					Indeks Kualitas Pencemaran Udara 92,06 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 36,05	
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total Volume Timbunan sampah Kabupaten/Kota	(18,601.69 / 18,842.48) = 98.7221 %	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		Tidak terdapat usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan atau izin PPLH
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	(470,711 / 471,490) = 99.8348 %	
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	(66,504 / 117,340) = 56.6763 %	
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	(123,243 / 124,476) = 99.0094 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Akte Kelahiran	----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun		
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	(10 / 24) = 41.6667 %	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun N)		Sejak tahun 2020 status Desa Tertinggal sesuai dengan Keputusan Dirjend. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 303 Tahun 2020 untuk Kabupaten Pacitan sudah tidak ada; Hal ini dapat diartikan bahwa Dinas PMD sudah mengentaskan desa tertinggal



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						100%
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun N)		Untuk tahun 2024 hanya ada perubahan status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju sebanyak 14 Desa dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 34 Desa, sedangkan status Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri adalah 0 Desa
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	1,77	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(68,497 / 93,555) = 73.2158 %	
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(7,456 / 93,555) = 7.9696 %	
15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan	0,88	Rasio Konektivitas Kabupaten



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				penyebrangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan		



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut		



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				(bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100) Bobot trayek atau lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5		
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,27	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	(16 / 39) = 41.0256 %	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	(7 / 8) = 87.5 %	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	(581,365 / 594,017) = 97.8701 %	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	daerah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Penduduk		Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	(177 / 527) = 33.5863 %	-
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	(291 / 25,033) = 1.1625 %	-
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	(Jumlah Investasi tahun N - jumlah Investasi tahun (N-1)) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun (N-1) di Kabupaten/Kota	(1,900,164,287,207 - 1,063,609,458,765) / 1,063,609,458,765 = 78.6524 %	Data dukung belum sesuai template
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	(3,029 / 119,838) = 2.5276 %	sudah sesuai template
		78	Tingkat partisipasi pemuda	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang	(5,595 / 119,838) = 4.6688 %	sudah sesuai



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota		template
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	15 Medali/Penghargaan	Masih menunggukrekan dari KONI
20	STATISTIK	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	(39 / 39) = 100 %	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	(39 / 39) = 100 %	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	(175 / 645) = 27.1318 %	Jumlah nilai per area keamanan informasi
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100%	(13 / 53) = 24.5283 %	Data dukung belum sesuai template



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				Jumlah cagar budaya yang terdata		
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	57,00	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan	69,66	
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43	$T = (a+i+s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$(100 + 99.59 + 100 +) / 4 = 74.8975$	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Tahun 2009 tentang Kearsipan	s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN		
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah preovinsi yang digabung dan/atau dibuabrkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	$100 = (100+100+100+100+100+100)/6$	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Ton) ----- X 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan dan Budidaya) yang ditetapkan	(12,529.97 / 14,519) = 86.3005 %	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Sebesar 11.091,14 Ton Dari Target 12.020 Ton (92,27%) Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 1.438,83 Ton Dari Target 2.499 Ton (57,57%) Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2024 sebesar 11.091,14 ton mengalami penurunan sebesar 1.849,31 ton atau 14,29 % dibanding produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2023 sebesar 12.940,45 ton. Penurunan produksi perikanan nelayan disebabkan oleh



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						penurunan produksi perikanan laut. Walaupun produksi PUD meningkat, namun tidak sebanding dengan penurunan produksi perikanan laut. Untuk produksi perikanan laut terjadi penurunan produksi sebesar 16 % dibanding Tahun 2023 dengan produksi Tahun 2024 sebesar 10.155 ton dan produksi tahun 2023 sebesar 12.084 ton. Komoditas perikanan utama yang mengalami penurunan produksi terdiri dari 4 jenis ikan yaitu Tuna turun



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						sebesar 10,8 ton atau 1 %, Tongkol turun sebesar 2.386 ton atau 39,3 %, Layang turun sebesar 388 ton atau 26 %, Layur turun sebesar 140 ton atau 15 % dibanding produksi Tahun 2023. Secara keseluruhan, 4 komoditas utama mengalami penurunan sebesar 2.226 ton atau 20,7 %. Untuk produksi perairan umum daratan (PUD) terjadi peningkatan sebesar 1,75 % dibanding tahun 2023 dengan produksi Tahun 2024 sebesar 871,799 ton dan produksi Tahun 2023 sebesar



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						856,826 ton. Penurunan produksi perikanan kelompok nelayan di tahun 2024 disebabkan karena : 1. Komoditas penangkapan ikan yang diburu nelayan semula adalah jenis-jenis ikan untuk konsumsi seperti ikan bersirip (Pisces), Crustacea dan Mollusca, namun saat ini kurang lebih 80% nelayan lokal juga melaksanakan penangkapan Benih Bening Lobster (BBL). Perolehan BBL dicatat sebagai produksi tersendiri,



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						tidak dimasukkan dalam lembar kerja yang sama dengan produksi perikanan tangkap . Penangkapan BBL diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla spp.</i>), dan Rajungan (<i>Portunus spp.</i>). 2. Terjadi fluktuasi produksi yang cukup signifikan



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						pada komoditas utama yaitu penurunan produksi ikan Tuna, Tongkol, Layang, Layur dan kenaikan produksi ikan Cakalang. Secara keseluruhan kelima komoditas utama tersebut mengalami penurunan sebesar 20,7 % dibandingkan produksi komoditas tersebut pada tahun 2023. Untuk diketahui, kelima komoditas utama pada tahun 2023 memberikan kontribusi produksi sebesar 82,9 % sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 77,1 %. Hal ini



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						terjadi karena jenis ikan komoditas utama yaitu Tongkol dan Layur tidak ber-ruaya (migrasi ikan) di wilayah penangkapan nelayan Pacitan. Jenis ikan Tongkol dan Layur adalah ikan yang memiliki sifat migrasi tinggi dengan habitat tidak menetap. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, bahwa hasil produksi nelayan yang dikonsumsi oleh keluarganya tidak dihitung untuk



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						pendataan produksi; Pada tahun 2024 Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1.438,83 ton atau mencapai 57,57 % dari target RPJMD tahun 2024 sebesar 2.499 ton. Produksi perikanan budidaya Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 13,73 ton atau turun 0,95 % dibanding produksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 1.452,56 ton. Terjadi penurunan produksi perikanan budidaya baik budidaya air tawar dan budidaya air



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						payau (tambak). Produksi budidaya air payau (tambak) selama ini memberikan kontribusi terbesar pada produksi perikanan budidaya. Pada Tahun 2024 dengan produksi sebesar 932,488 ton terjadi penurunan produksi budidaya air payau (tambak) sebesar 17,543 ton atau 1,85 % dibanding tahun 2023 sebesar 950,031 ton. Penyebab turunnya produksi budidaya tambak karena banyak tambak yang terserang wabah penyakit AHPND atau EMS



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						(Early Mortality Syndrome) yang menyebabkan kematian hingga 100 % serta menurunnya daya dukung lingkungan (carrying capacity) disebabkan pengelolaan lingkungan yang kurang baik, kesadaran petambak untuk mengelola limbah dengan IPAL masih rendah dan belum menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Banyak petambak akhirnya menghentikan sementara budidaya tambak udang dan ada yang mengganti komoditas nila



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						salin sebagai cara memulihkan kolam tambak agar bisa digunakan untuk siklus budidaya udang berikutnya. Penurunan produksi perikanan budidaya juga disebabkan oleh kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual produk sehingga meningkatkan biaya operasional. Banyak pembudidaya yang mengurangi jumlah tebar benih atau malah berhenti tidak melakukan budidaya karena keterbatasan modal untuk membeli pakan.



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun (N-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun (N-1)	(1,144,302 - 1,306,817) / 1,306,817 = -12.4359 %	jumlah kunjungan wisata
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun (N-1)) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun (N-1)	(1,144,302 - 1,306,817) / 1,306,817 = -12.4359 %	jumlah wisatawan
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	(9,151 / 298,935) = 3.0612 %	Data dukung belum sesuai template
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB (dalam satuan Rupiah) dari sektor Pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB (dalam satuan Rupiah)	(6,093,181,000 / 19,490,050,000) = 31.2630 %	Data PDRB sektor pariwisata di ambil dari BPS Kab.Pacitan Volume 8, 2024
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ----- x 100% Jumlah total PAD	(8,587,629,500 / 176,500,853,935.58) = 4.8655 %	PAD Terhitung sampai 31 november 2024
27	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ----- x 100% Luas panen (ha)	(449,530 / 57,831) = 777.3167 %	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun N – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun (N-1) ----- x 100%	(3,153 - 3,285) / 3,285 = -4.0183 %	



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun (N-1)		
28	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	Tidak	
29	PERDAGANGAN	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	(161 / 536) = 30.0373 %	
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	(20,469.86 / 42,757.75) = 47.8740 %	
		99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	(667 / 1,928) = 34.5954 %	
30	PERINDUSTRIAN	100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun N} - \text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (N-1)})}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun (N-1)}} \times 100\%$	(12,324 - 12,106) / 12,106 = 1.8008 %	-



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x 100% Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP	(6 / 10) = 60 %	-
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	(36 / 46) = 78.2609 %	-
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		Izin perluasan industri tidak ada
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		tidak memiliki kawasan industri



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	65% 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Tidak 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Ada 6. Informasi tenaga kerja (10%) Ada 7. Informasi Investasi (10%) Ada	informasi produksi, informasi bahan baku, dan informasi tenaga kerja data pendukung di peroleh per desember setiap tahunnya 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 3. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) 4. Informasi tenaga kerja (10%) 5. Informasi Investasi (10%) TOTAL 65%
				Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan	$(44 / 12,324) = 0.3570 \%$	.



NO.	URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- X 100% Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota		
31	TRANSMIGRASI	106	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	0 Kawasan	NIHIL
				Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	0 Permukiman	NIHIL
				Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak	0 Permukiman	NIHIL

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 berdasarkan dengan Indikator



Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci penunjang urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 2.3
Indikator Kinerja Kunci Penunjang

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	(564,277,995,443 / 1,825,386,979,231.09) = 30.9128 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA s/d Oktober 2024
2	Rasio PAD	(223,727,536,379.91 / 1,766,250,786,234.91) = 12.6668 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA sd Oktober 2024



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ada 3,190 (SPIP 2023)	Inspektorat Kabupaten Pacitan	Tingkat Maturitas SPIP masih proses penilaian BPKP sehingga untuk Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP belum ada. Untuk hasil penilaian sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 belum ada
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Ada 3	Inspektorat Kabupaten Pacitan	Hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Quality Assurance oleh BPKP tahun ini 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	(1,617,256,109,227.95 - 361,303,347,621) / 1,825,386,979,231.09 = 68.8047 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA s/d 4 Desember 2024



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	
8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$(263,245,000,000 / 398,116,000,000) = 66.1227 \%$	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Data Dukung terlampir
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$(586,801 / 734,703) = 79.8691 \%$	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Data Dukung terlampir
10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$(663,365,000,000 - 719,914,000,000) / 719,914,000,000 = - 7.8550 \%$	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Data Dukung terlampir



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$(1,058 / 1,179) = 89.7371 \%$	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	Jumlah PNS yang memiliki Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas dibanding jumlah seluruh PNS (kecuali guru dan tenaga Kesehatan)
12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$(287 / 1,179) = 24.3427 \%$	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi Jumlah Seluruh pegawai (diluar guru dan tenaga kesehatan)
13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$(287 / 287) = 100 \%$	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	Jabatan Fungsional PSN yang bersertifikat dibanding Seluruh Jabatan Fungsional PNS
14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	$(1,825,386,979,231.09 / 1,699,341,065,069) - 1 = 7.4173 \%$	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA s/d 4 Desember 2024 & LRA Januari 2024



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	(223,727,536,379.91 / 209,760,650,300) - 1 = 6.6585 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA s/d 4 Desember 2024 & LRA Januari 2024
16	Assets Management	4 Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	
17	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	(116,508,846,101 / 1,652,761,570,399) = 7.0493 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA sd Okoteber 2024
18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(863,592,157,802.38 / 1,181,123,364,507) = 73.1162 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	LRA s/d 4 Desember 2024



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	(11 / 11) = 100 %	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	data dukung belum sesuai tempate, mohon untuk dilengkapi (alamat website belum tercantum)



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib Menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud komitmen Bupati selaku pengembal amanah Masyarakat dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024 pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Pacitan “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- A. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capainkinerjanya, dengan rumus: $\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$



- B. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus: $\text{Persentase Capaian kinerja} = \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%$

Target Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja bertujuan:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai



Berikut merupakan perjanjian kinerja Bupati Pacitan yang menggambarkan kinerja yang akan dicapai Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	70
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,76
Misi: Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa			
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,65
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,811
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	10.153.214
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	86,52
5.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	73
6.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,28
Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya			
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	6,45
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	38.360.444
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.841.457.615
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.355.388.082
		PDRB Industri	852.332.423



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Pengolahan	
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,3
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,8
Misi: Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani			
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,95
		Nilai IKM	84,88
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	79
3	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	79
		Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	3
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	41,42

Dalam Upaya pencapaian kinerja pemerintah daerah diperlukan anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Anggaran Pada Perjanjian Kinerja

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	935.839.366.244	982.417.486.157
2	Program Pengelolaan Pendidikan	103.891.819.566	112.692.615.308
3	Program Pengembangan Kurikulum	20.000.000	20.000.000
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	9.612.400.000	10.018.400.000
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.000.000	10.000.000
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.127.211.095	84.083.356.925



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.724.716.500	6.075.915.252
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	485.844.000	495.844.000
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.754.421.720	2.975.801.341
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.386.511.000	12.989.787.377
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.337.873.000	12.240.404.377
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.000.000	104.500.000
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0	390.960.000
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.875.000.000	3.216.743.623
15	Program Pengembangan Permukiman	6.016.735.000	6.016.735.000
16	Program Penataan Bangunan Gedung	3.067.725.000	4.686.358.610
17	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.314.655.000	3.040.402.390
18	Program Penyelenggaraan Jalan	61.203.405.995	93.751.625.834
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	72.620.000	30.695.000
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.100.000.000	1.250.000.000
21	Program Pengembangan Perumahan	294.070.000	317.234.175
22	Program Kawasan Permukiman	1.066.594.000	1.759.029.325
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	277.130.000	282.030.000
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	12.626.996.878	33.861.443.804
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.694.576.484	3.979.576.484
26	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	475.000.000	650.000.000



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
27	Program Penanggulangan Bencana	1.789.390.525	2.295.090.525
28	Program Pemberdayaan Sosial	384.200.000	534.200.000
29	Program Rehabilitasi Sosial	462.400.000	722.400.000
30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.300.127.200	8.309.479.700
31	Program Penanganan Bencana	170.000.000	180.647.500
32	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25.000.000	95.000.000
33	Program Perencanaan Tenaga Kerja	30.000.000	30.000.000
34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.142.661.400	2.807.503.480
35	Program Penempatan Tenaga Kerja	170.000.000	170.000.000
36	Program Hubungan Industrial	25.000.000	235.000.000
37	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	285.000.000	530.000.000
38	Program Perlindungan Perempuan	55.600.000	55.600.000
39	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	45.000.000	45.000.000
40	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	10.000.000	10.000.000
41	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	173.000.000	173.000.000
42	Program Perlindungan Khusus Anak	250.000.000	315.000.000
43	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	50.000.000	61.100.000
44	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	175.000.000	369.090.000
45	Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000	30.000.000
46	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.000.000	20.000.000
47	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	165.001.085	165.001.085
48	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.025.000.000	5.595.644.000
49	Program Penatagunaan Tanah	562.957.215	634.707.060



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	571.079.000	621.079.000
51	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	247.411.000	247.411.000
52	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.828.233.000	2.278.233.000
53	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15.250.000	72.550.000
54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.830.000	120.830.000
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25.000.000	25.000.000
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45.000.000	45.000.000
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000	55.000.000
58	Program Pengelolaan Persampahan	4.608.966.800	5.504.017.300
59	Program Pendaftaran Penduduk	100.000.000	105.200.000
60	Program Pencatatan Sipil	95.000.000	100.000.000
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	158.296.000	168.296.000
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.705.000	24.705.000
63	Program Penataan Desa	150.064.000	150.064.000
64	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	151.200.000	151.200.000
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.461.083.832	5.189.033.928
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.215.000.000	1.528.500.000
67	Program Pengendalian Penduduk	360.976.600	360.976.600
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.038.387.750	9.038.387.750
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.446.423.400	3.471.423.400



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.439.664.000	2.739.664.000
71	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	520.000.000	887.000.000
72	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.442.925.000	1.467.866.500
73	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.000.000	25.000.000
74	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.000.000	40.000.000
75	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30.000.000	30.000.000
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	299.332.200	299.332.200
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	135.500.000	127.500.000
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.170.916.800	1.485.916.800
79	Program Pengembangan UMKM	123.541.000	123.541.000
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000
81	Program Promosi Penanaman Modal	15.000.000	35.000.000
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	30.038.000	76.563.000
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	795.942.000	835.942.000
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.962.000	9.962.000
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	525.000.000	700.000.000
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.000.000.000	4.805.000.000
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000	400.000.000
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	300.000.000	330.000.000
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.642.000	6.642.000
90	Program Pengembangan Kebudayaan	1.625.000.000	2.245.000.000



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.000.000	463.320.000
92	Program Pembinaan Sejarah	230.000.000	468.700.000
93	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000	200.000.000
94	Program Pengelolaan Permuseuman	100.000.000	100.000.000
95	Program Pembinaan Perpustakaan	391.600.000	536.660.000
96	Program Pengelolaan Arsip	230.845.000	240.845.000
97	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	6.255.000	6.255.000
98	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.351.983.000	1.633.914.000
99	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	672.494.500	1.057.494.500
100	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	429.802.000	589.802.000
101	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.454.926.000	10.804.926.000
102	Program Pemasaran Pariwisata	808.349.975	1.383.349.975
103	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.382.517.500	2.500.517.500
104	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.900.882.700	8.659.682.700
105	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.879.202.500	5.517.802.500
106	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.000.000	75.000.000
107	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	653.392.700	75.000.000
108	Program Perizinan Usaha Pertanian	15.000.000	15.000.000
109	Program Penyuluhan Pertanian	1.535.000.000	1.535.000.000
110	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	70.000.000	70.000.000
111	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.084.285.832	2.574.700.368
112	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	125.000.000	175.000.000
113	Program Pengembangan Ekspor	112.265.000	312.265.000



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
114	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	78.000.000	78.000.000
115	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	92.735.000	92.735.000
116	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	611.000.000	631.000.000
117	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.000.000	9.000.000
118	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.000.000	5.000.000
119	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.250.000.000	5.080.000.000
120	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.764.796.816	3.252.281.316
121	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	21.136.273.914	24.098.274.924
122	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.472.201.345	1.828.797.695
123	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.835.000.000	2.235.000.000
124	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	283.707.223.327	296.362.492.363
125	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	800.000.000	1.072.000.000
126	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.274.000.000	3.112.338.500
127	Program Kepegawaian Daerah	600.000.000	1.584.576.000
128	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	955.000.000	955.000.000
129	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	750.000.000	1.050.000.000
130	Program Penyelenggaraan Pengawasan	890.210.000	1.131.730.000
131	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	629.494.500	549.614.500
132	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	727.262.020	827.524.545
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.819.224.826	8.134.296.121



NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
134	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.341.963.959	1.670.207.429
135	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	628.729.630	729.050.530
136	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.271.002.381	1.549.106.576
137	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.003.000.000	1.083.000.000
138	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.328.767.355	30.536.767.355
139	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	195.000.000	270.000.000
140	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.000.000	55.000.000
141	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	6.220.000.000	7.233.620.000
	JUMLAH	1.699.341.065.069	1.880.883.892.207

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
Misi: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	87,45	112,12	Sangat berhasil



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil		(IKLI)				
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	70	75,6	108,00	Data belum tersedia
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,76	64,92	101,82	Sangat berhasil
Misi: Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa						
Tujuan 2 Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan Bahagia		Indeks Pembangunan Manusia	71,3	71,49	100,27	Sangat berhasil
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,65	0,616	98,56	berhasil
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,811	0,84	103,58	Sangat berhasil
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	10.153.214	10.099.000	99,47	berhasil
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	86,52	86,16	99,58	Berhasil
5.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	73	79,23	108,53	Sangat berhasil
Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan		Angka Kemiskinan	12,87	13,08	99,98	berhasil
6.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,28	0,327	99,83	berhasil



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya						
Tujuan 4 Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan		% pertumbuhan ekonomi	5,24	4,34	82,82	Cukup
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	6,45	4,92	76,28	Cukup
		Pendapatan per kapita (juta/orang /tahun)	36.360.444	35.090.000	96,51	berhasil
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.841.457.615	2.817.710.000	99,16	berhasil
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.355.388.082	2.417.740.000	102,65	Sangat Berhasil
		PDRB Industri Pengolahan	862.332.423	963.480.000	111,73	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,3	1,825	55,30	kurang
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,8	9,31	99,81	berhasil
Misi: Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani						
	Tujuan 5 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive	Indeks Reformasi Birokrasi	69,5	82,1	118,13	Sangat Berhasil
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,95	3,5	179,49	Sangat Berhasil
		Nilai IKM	84,88	83,83	98,76	Berhasil
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	79	78,5		Data belum tersedia



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
3	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	79	67,75	85,76	Cukup
		Opini BPK	WTP	WTP	100	Berhasil
		Maturitas SPIP	3	3	100	Berhasil
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	41,42	48,5	117	Sangat Berhasil

- **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, WILAYAH PERBATASAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SECARA AKSELERATIF DAN ADIL**

Tujuan pertama dari RPJMD adalah Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil. Pencapaian tujuan ini diukur menggunakan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang didukung ketercapaian indeks infrastruktur serta pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu komponen indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja suatu kabupaten atau kota. Indeks ini didasarkan pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas-fasilitas dasar. Indeks infrastruktur Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 sebesar 75,6 atau tercapai 108% dari target. Beberapa program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan, antara lain peningkatan jalan kabupaten, pemerataan layanan listrik dan internet, pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu dan pembangunan infrastruktur air minum.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur Pemerintah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik



maupun aspek manfaat. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 87,45 atau tercapai 112,12% dari target.

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Klasifikasi Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$
2. Baik $70 \leq x < 90$
3. Sedang $50 \leq x < 70$
4. Kurang $25 \leq x < 50$
5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar 64,92 yang menggambarkan kondisi lingkungan berada pada posisi sedang. Berbagai upaya yang dilakukan agar kelestarian lingkungan hidup meningkat sebagai berikut:

1. Pemetaan kualitas lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup;
 2. Pembinaan kepada masyarakat, usaha dan/atau kegiatan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Penghentian aktivitas/kegiatan yang menimbulkan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
 4. Melakukan upaya perbaikan kembali kualitas lingkungan hidup.
- **MENINGKATKAN SAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BAHAGIA**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu: Umur panjang dan sehat, Pengetahuan dan Kehidupan yang layak. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian



pembangunan manusianya semakin baik. Standar United Nations Development Program (UNDP) tentang IPM adalah:

- IPM >80 kategori sangat tinggi,
- IPM 70-79 kategori tinggi,
- IPM 60-79 kategori sedang.

Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan sebesar 71,49 mencapai 100,27% dari target atau masuk kategori tinggi. IPM Kabupaten Pacitan meningkat namun masih di bawah nilai IPM Jawa Timur yaitu 75,35. Pencapaian IPM Kabupaten Pacitan didukung dengan pencapaian Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pengeluaran perkapita, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Kebahagiaan dengan rata-rata capaian 100,29%

- **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN**

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan perkapita perbulan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 307.643 dengan angka kemiskinan sebesar 13,08 dan jumlah penduduk miskin Tahun 2024 sebanyak 73,03 ribu jiwa. Sejak Tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan terus mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan yang sebelumnya sebesar 15,11% pada tahun 2021 kini telah turun menjadi 13,08% pada tahun 2024.

Berdasarkan urutan angka kemiskinan terbanyak, Angka kemiskinan Kabupaten Pacitan merupakan urutan ke 31 dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebanyak 9,79. Dengan demikian masih perlu adanya upaya lebih agar prosentase kemiskinan menurun.

Dilihat dari data indeks gini, Kabupaten Pacitan berada pada indeks 0,327 yang berarti bahwa Tingkat ketimpangan pendapatan semakin menurun dibandingkan Tahun 2023 dimana indeks gini sebesar 0,352.



- **MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS SEKTOR UNGGULAN**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 sebesar 4,34 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruti (PDRB) atas dasar harga berlaku. Pada triwulan II sempat mencapai angka 6,97%. Angka ini menempatkan Pacitan sebagai peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur, setelah Kabupaten Lamongan yang tumbuh 7,61%. Pertumbuhan ekonomi Pacitan Triwulan II 2024 terkonsentrasi pada wilayah pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Pacitan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 12,23 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 12,19 persen.

Dilihat dari kontribusinya, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan terbesar pada perekonomian Pacitan pada Tahun 2024, yaitu sebesar 26,11 persen; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,25 persen; dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 14,77 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) memberi kontribusi terbesar, yaitu sebesar 77,67 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 42,42 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,02 persen.

- **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF, PROFESIONAL DAN REPONSIF**

Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan reponsif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2024 hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan sebesar 82,1. Apabila dilihat dari capaian Tahun 2023 nilai RB meningkat sebesar 7,55% dan naik menjadi predikat A. Pencapaian ini didukung dengan sasaran

- a. Meningkatkan layanan publik yang inovatif



- b. Pengembangan akapasitas ASN pemerintah daerah
- c. Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan
- d. Meningkatkan kemandirian desa

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 2.7 VISI : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2023	2024	
Misi 1: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil					
Indikator Tujuan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	87,44	87,45	0,06
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	73,06	75,6	3,48
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,97	64,92	1,49
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa					
Tujuan 2 Meningkatkan saya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan bahagia					
Indikator Tujuan		Indeks Pembangunan Manusia	70,94	71,49	0,78
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,615	0,616	0,16
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0
5.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.681.000	10.099.000	4,32
6.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	85,09	86,16	1,26
7.	Meningkatnya Kebahagiaan Masvarakat	Indeks Kebahagiaan	79,6	79,23	0,46



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2023	2024	
Tujuan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan					
Indikator Tujuan		Angka Kemiskinan	13,65	13,08	-4,18
8.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,352	0,327	-7,10
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya					
Tujuan 4 Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan					
Indikator		% pertumbuhan ekonomi	4,46	4,34	
9.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	29,08	4,92	-83,08
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	33.149.000	35.090.000	5,86
10.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.827.383.900	2.817.710.000	-0,34
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.297.289.100	2.417.740.000	5,24
		PDRB Industri Pengolahan	889.971.700	963.480.000	8,26
11.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	1,775	1,825	2,82
12.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	9,06	9,31	2,76
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani					
Tujuan 5		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsif			
Indikator		Indeks Reformasi Birokrasi	76,34	82,1	7,55
13.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	3,34	3,5	4,79
		Nilai IKM	83,63	83,83	0,24
14.	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	64,86	78,5	21,3
15.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	68,71	67,75	-1,40
		Opini BPK	WTP	WTP	
		Maturitas SPIP	3	3	
16.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	28,14	48,5	72,35



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 secara keseluruhan rata-rata meningkat meskipun terdapat beberapa indikator yang belum tersedia data. Sesuai RPJMD terdapat 5 (lima) indikator tujuan dan terdapat 22 (dua puluh dua) indikator sasaran yang harus tercapai selama lima tahun. Indikator tujuan tercapai lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023. Sedangkan indikator sasaran terdapat 3 (tiga) indikator yang mengalami penurunan yaitu indeks kebahagiaan, persentase pertumbuhan PAD dan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, ICOR dan nilai SAKIP.

Angka Pertumbuhan PAD pada tahun 2024 tidak dapat terpenuhi dan terbaca ada penurunan dibandingkan capaian angka pertumbuhan PAD tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Realisasi Angka Pertumbuhan PAD pada tahun 2023 memang sangat tinggi disebabkan pelaksanaan BLUD pada 24 Puskesmas di tahun 2023 sehingga pencatatan pendapatan BLUD masuk pada komponen PAD.
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 1 Januari 2024, ada beberapa jenis retribusi yang tidak bisa lagi dipungut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tidak ada penerimaan dari jenis retribusi tersebut.

Hasil evaluasi SAKIP pada Tahun 2024 sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Komponen yang mengalami penurunan pada evaluasi SAKIP yaitu komponen perencanaan kinerja dan komponen pengukuran kinerja. Masih ditemukan rumusan kinerja di level Perangkat Daerah yang belum memiliki indikator kinerja yang menggambarkan kecukupan dalam mengawal sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja PD. Selain itu penjenjangan kinerja belum sesuai dengan ketentuan dan identifikasi *crosscutting* kinerja belum tergambar dengan baik.



D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Tabel 2.8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam
Pembangunan Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup						
Tujuan 1		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil				
Indikator Tujuan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	82	87,45	6,65	Lebih tinggi
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	72	75,6	5	Lebih tinggi
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,26	64,92	-0,52	
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa						
Tujuan 2		Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan bahagia				
Indikator Tujuan		Indeks Pembangunan Manusia	72,66	71,49	-1,61	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,639	0,616	-3,60	
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,818	0,84	2,69	Lebih tinggi
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	10.691.329	10.099.000	-5,54	
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	87,11	86,16	-1,09	
5.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	73,5	79,23	7,80	Lebih tinggi



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Tujuan 3		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan				
	Indikator Tujuan	Angka Kemiskinan	12,22	13,08	-6,57	Nilai harus diturunkan untuk mendapatkan capaian yang baik
6	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,25	0,327	-23,55	Nilai harus diturunkan untuk mendapatkan capaian yang baik
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya						
Tujuan 4		Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan				
	Indikator	% pertumbuhan ekonomi	5,25	4,46	-17,33	
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	2,82	4,92	74,47	Lebih tinggi
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	42.171.572	35.090.000	-16,79	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.909.003.882	2.817.710.000	-3,14	
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.522.976.616	2.417.740.000	-4,17	
		PDRB Industri Pengolahan	900.239.686	963.480.000	7,02	Lebih tinggi
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,5	1,825	-47,86	
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,6	9,31	-1,71	
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani						



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Tujuan 5		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsif				
Indikator		Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	82,1	16,45	Lebih tinggi
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	2,5	3,5	40	Lebih tinggi
		Nilai IKM	85,5	83,83	-1,95	
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	81	78,5	-3,09	
3	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	84	67,75	-19,35	
		Opini BPK	WTP	WTP		
		Maturitas SPIP	3	3		
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	46,15	48,5	5,09	Lebih tinggi

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan target kinerja akhir RPJMD. Sebagaimana tabel diatas pada indikator tujuan terdapat 2 (dua) indikator yang melebihi target RPJMD yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan indikator sasaran yang melebihi target RPJMD terdapat 7 (tujuh) indikator yaitu indeks infrastruktur, indeks Kesehatan, indeks kebahagiaan, Persentase Pertumbuhan PAD, PDRB industri pengolahan, Indeks SPBE dan Persentase Desa Mandiri.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Tabel 2.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

N O	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI (%)



1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	108	97,36	10,64
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	101,82	96,43	5,39
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	98,56	95,31	3,25
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	103,58	93,43	10,14
5	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	99,47	99,18	0,29
6	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	99,58	98,07	1,51
7	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	108,53	98,48	10,05
8	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	99,83	96,75	3,08
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	86,39	96,59	-10,19
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	104,51	95,45	9,07
11	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	55,30	94,88	-39,57
12	Meningkatnya Nilai Investasi	99,81	97,58	2,22
13	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	140,12	94,86	45,27
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	99,37	88,80	10,56
15	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	95,25	99,63	-4,38
16	Meningkatnya Kemandirian Desa	117,09	97,03	20,06
Rata-rata efisiensi				4,84

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 terjadi efisiensi anggaran. Terhadap 16 (enam belas) sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan tingkat efisiensi positif sebanyak 13 (tiga belas) sasaran pembangunan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) sasaran tingkat efisiensi anggarannya rendah. Rata-rata efisiensi pada Tahun 2024 sebanyak 4,48%.



F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026, tema pembangunan pada tahun 2024 adalah “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta menjaga stabilitas sosial”, dengan didukung program-program prioritas dalam pencapaian pada setiap misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan jaringan komunikasi wilayah perbatasan.
2. Intensifikasi penggunaan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter dan pelayanan kesehatan yang modern.
3. Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata.
4. Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal.
5. Penguatan solidaritas sosial berbasis kearifan lokal.
6. Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.



F1. SASARAN MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEREKONOMIAN DAN AKSESIBILITAS

Tabel 2.10 Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	73,06	75,6	108,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93.751.625.834	90.680.746.716	96,72
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	93.751.625.834	90.680.746.716	96,72
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.989.787.377	12.588.654.133	96,91
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.558.411.000	8.481.883.250	99,11
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.431.376.377	4.106.770.883	92,67
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.016.735.000	6.009.997.014	99,89
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.016.735.000	6.009.997.014	99,89
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.759.029.325	1.754.076.200	99,72



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.759.029.325	1.754.076.200	99,72
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	282.030.000	279.257.500	99,02
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	282.030.000	279.257.500	99,02
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	33.861.443.804	33.542.512.729	99,06
					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	33.861.443.804	33.542.512.729	98,96
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.739.664.000	2.683.843.040	97,96
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	15.000	-	-
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	726.480.000	725.257.300	99,83
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	622.720.000	605.925.640	97,30
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	870.140.000	842.592.900	96,83



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	214.000.000	207.186.000	96,82
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	183.094.000	182.493.200	99,67
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.000		-
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	117.200.000	114.388.000	97,60
					Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	100,00
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.240.404.377	12.078.908.083	98,68
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.240.404.377	12.078.908.083	98,68
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	104.500.000	103.927.785	99,45



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	104.500.000	103.927.785	99,45
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	390.960.000	389.563.233	99,64
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.960.000	389.563.233	99,64
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.216.743.623	3.176.252.602	98,74
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.216.743.623	3.176.252.602	98,74
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.686.358.610	4.652.695.028	99,28
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.686.358.610	4.652.695.028	99,28



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.040.402.390	2.749.957.301	90,45
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	3.040.402.390	2.749.957.301	90,45
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	30.695.000	26.631.145	86,76
					Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30.695.000	26.631.145	86,76
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.250.000.000	1.228.117.150	98,25
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	287.080.000	283.134.700	98,63
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485.560.000	477.422.793	98,32
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	148.105.217	98,74
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	327.360.000	319.454.440	97,59



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	317.234.175	313.090.350	98,69
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.000.000	39.685.000	99,21
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.334.175	203.059.000	99,38
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	72.900.000	70.346.350	96,50
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	165.001.085	115.889.450	70,24
					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.001.085	115.889.450	70,24
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.595.644.000	5.432.512.630	97,08
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.595.644.000	5.432.512.630	97,08



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	634.707.060	579.052.589	91,23
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	634.707.060	579.052.589	91,23
						177.056.230.660	172.375.687.664	97,36

Sasaran meningkatnya pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas dengan indikator indeks infrastuktur didukung 19 (sembilan belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total anggaran Rp. 177.056.230.660,00 dan realisasi anggaran Rp. 172.375.687.664,00 atau tercapai 97,37%. Program tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perhubungan.

Indeks Infrastruktur adalah indeks yang menunjukkan kualitas pembangunan infrastruktur ditinjau dari lima (5) aspek yaitu jalan dengan kondisi mantap, rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, drainase dalam kondisi baik dan luas sawah beririgasi dalam kondisi baik. Capaian Indeks Infrastuktur Tahun 2024 didukung dengan pencapaian:

1. Jalan dengan kondisi mantap
2. Rumah tangga dengan akses air minum layak merupakan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.
3. Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi layak
4. Prosentase drainase dalam kondisi baik
5. Prosentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik



F2. Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Tabel 2.11 Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,76	64,92	101,82	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	621.079.000	573.797.556	92,39
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	621.079.000	573.797.556	92,39
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	247.411.000	241.083.160	97,44
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	247.411.000	241.083.160	97,44
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.504.017.300	5.277.423.821	95,88
					Pengelolaan Sampah	5.504.017.300	5.277.423.821	95,88
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.278.233.000	2.258.717.441	99,14
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.278.233.000	2.258.717.441	99,14
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.550.000	61.605.000	84,91
					Penyimpanan sementara Limbah B3	72.550.000	61.605.000	84,91



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	120.830.000	117.361.080	97,13
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120.830.000	117.361.080	97,13
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.000.000	23.158.000	92,63
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	23.158.000	92,63
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.000.000	43.678.800	97,06
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	43.678.800	97,06
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000	52.035.200	94,61
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	55.000.000	52.035.200	94,61



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Kabupaten/Kota			
					JUMLAH	8.969.120.300	8.648.860.058	96,43

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan Pemerintah. Analisis dan penilaian di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) komponen yaitu Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Rekapitulasi dari ketiga komponen tersebut merupakan nilai akhir dan menjadi rating terhadap kondisi lingkungan di sebuah kawasan yaitu kondisi Buruk, Sedang, ataupun Baik.

Tahun 2024 menggunakan indeks kualitas lahan (IKL) sesuai Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021, perhitungannya berdasarkan data spasial. Target IKL juga disesuaikan dengan SE Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan rancangan Pembangunan jangka menengah Daerah berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2024, indeks kualitas udara 92,06 %, Indeks kualitas air 52,50% dan Indeks tutupan lahan 36,05%. Secara keseluruhan capaian IKLH Kabupaten pada tahun 2024 sebesar 64,92 / kategori sedang dan mencapai target RPJMD Tahun 2024.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dengan indikator IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) didukung oleh 9 (Sembilan) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran Rp. 8.969.120.300,00 terealisasi Rp. 8.648.860.058,00 atau tercapai 96,43%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



F3. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

Tabel 2.12 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,625	0,616	98,56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112.692.615.308	107.629.634.511	95,51
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.528.830.200	58.866.236.767	95,67
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.380.073.000	30.372.365.524	93,80
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.678.230.108	15.405.405.200	98,26
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.105.482.000	2.985.627.020	96,14
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.018.400.000	9.293.956.005	92,77
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.018.400.000	9.293.956.005	92,77



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	20.000.000	18.776.900	93,88
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.000.000	9.304.500	93,05
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	10.000.000	9.472.400	94,72
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000	9.864.000	98,64
					Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000	9.864.000	98,64
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	536.660.000	530.014.444	98,76
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508.229.500	502.147.044	98,80
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.430.500	27.867.400	98,02



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGELOLAA ARSIP	240.845.000	237.929.424	98,79
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	214.568.000	211.882.250	98,75
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26.277.000	26.047.174	99,13
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.255.000	5.384.300	86,08
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.255.000	5.384.300	86,08
					JUMLAH	123.524.775.308,00	117.725.559.583,30	95,31

Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas.

Indikator Kinerja angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2023 sebesar 7.88 tahun atau mencapai 101,69% dari target RPJMD Tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2023 melalui kolaborasi dengan Pemerintah Desa



untuk mendorong masyarakatnya meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pendidikan non formal. Capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yaitu Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,90 tahun naik 0,02 dari tahun sebelumnya, kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Adanya intervensi dari dana ADD untuk membiayai penduduk umur 25 tahun ke atas untuk mengikuti jenjang Paket A, B dan C,
- 2) Meningkatnya peran serta lembaga PKBM/SKB dalam mendorong penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan untuk mengikuti kejar Paket A, B dan C

Capaian kinerja Tahun 2024 ini didukung dengan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Kejar Paket A, B, dan C
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Bantuan perlengkapan siswa Pendidikan Nonformal

Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 sebesar 12,68 tahun atau mencapai 98,06% dari target RPJMD Tahun 2023, capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD Tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 12,69 atau naik 0,01 dibandingkan dengan tahun 2023.

Capaian kinerja Tahun 2024 ini didukung dengan Program Pengelolaan Pendidikan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut

- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Bantuan Operasional Sekolah
- Bantuan untuk siswa yang tidak mampu
- Peningkatan Kompetensi Guru



Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan tercapai 98,56% didukung oleh 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran Rp. 123.524.775.308,00 terealisasi Rp. 117.725.559.583,30 atau sebesar 98,56%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

F4. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.13 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,811	0,84	103,58	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	84.083.356.925	77.981.019.552	92,74
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.497.557.111	29.522.214.621	90,84
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.305.960.204	48.182.489.147	93,91
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	169.840.000	169.773.300	99,96
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.999.610	106.542.484	96,86
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.075.915.252	5.654.567.557	93,07



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	17.460.000	17.111.000	98,00
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.505.241.752	4.249.290.543	94,32
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.553.213.500	1.388.166.014	89,37
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	495.844.000	466.599.030	94,10
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	73.730.000	70.364.000	95,43
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	228.600.000	214.790.000	93,96
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah	193.514.000	181.445.030	93,76



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Tangga			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.975.801.341	2.874.663.600	96,60
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.158.575.621	1.156.002.500	99,78
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	488.907.720	484.528.800	99,10
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1328318000	1234132300	92,91
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	360.976.600	319.491.330	88,51
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dengan Kabupaten Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	83.176.600	77.467.500	93,14
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	277.800.000	242.023.830	87,12



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.038.387.750	8.763.375.148	96,96
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.419.940.000	1.378.960.675	97,11
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.067.816.000	4.913.037.376	96,95
					n Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	2.279.381.750	2.204.515.097	96,72
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB	271.250.000	266.862.000	98,38
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.471.423.400	3.447.952.980	99,32
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	623.823.400	600.352.980	96,24



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.847.600.000	2.847.600.000	
					JUMLAH	106.501.705.268	99.507.669.197	93,43

Derajat Kesehatan merupakan gambaran profil Kesehatan pada suatu daerah yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan tahun 2024 berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan BPS Kabupaten Pacitan adalah 74,78 atau meningkat 0,16 dibandingkan capaian Tahun 2023. Selama periode 2021 hingga 2024 AHH Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan. AHH Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh angka kematian bayi, angka kematian ibu dan prosentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan. Angka kematian bayi dimana pada Tahun 2024 sebanyak 51 kematian bayi. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan angka Tahun 2023. Angka kematian ibu menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 2 kematian ibu. Sedangkan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan tercapai 100% yang artinya semua ibu bersalin ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas Kesehatan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan tercapai 103,58% didukung oleh 7 (tujuh) program dengan anggaran Rp. 106.501.705.268,00 terealisasi 103,587%. Program tersebut dilaksanakan



oleh Dinas Kesehatan beserta unit kerja dibawahnya yaitu Rumah Sakit Dr. Darsono dan 24 (Dua Puluh Empat) Puskesmas dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

F 5. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Tabel 2.14 Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	10.153.214	10.099.000	99,47	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	175.000.000	173.557.000	99,18
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	175.000.000	173.557.000	99,18

Daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga barang serta jasa. Kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Namun sebaliknya, kemampuan beli masyarakat nantinya akan meningkat apabila harga-harga tersebut menurun. Untuk mengukur daya beli masyarakat digunakan indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Rp. 10.009.000,00 mengalami kenaikan 4,32% dari Tahun 2023 yang menandakan bahwa daya beli masyarakat Pacitan meningkat.



Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat dengan indikator Pengeluaran per kapita tercapai 99,18% didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 175.000.000,00 terealisasi 98,40%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja. Meskipun anggaran yang dikelola dalam peningkatan kemampuan daya beli Masyarakat hanya terbatas satu program, namun dalam pencapaiannya dipengaruhi faktor-faktor lain seperti ketersediaan stok bahan pokok dan penting, fluktuasi harga, pertumbuhan UMKM dan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain maupun Masyarakat.

F6 Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan

Tabel 2.15 Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	86,52	86,16	99,58	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	530.000.000	525.556.131	99,16
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	79.000.381	98,75
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	450.000.000	446.555.750	99,23



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Kabupaten/Kota			
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	55.600.000	55.120.000	99,14
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.520.000	95,20
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	45.600.000	45.600.000	100,00
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	45.000.000	42.856.200	95,24
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	42.856.200	95,24
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000	9.340.400	93,40
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.340.400	93,40
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	173.000.000	168.568.000	97,44



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	173.000.000	168.568.000	97,44
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.000.000	305.384.823	96,95
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	295.000.000	291.035.600	98,66
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	14.349.223	71,75
					JUMLAH	1.128.600.000	1.106.825.554	98,07

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundangundangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang



menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 86,16 mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar 1,26%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) tercapai 98,69% didukung oleh 6 (enam) program dan 9 (sembilan) dengan anggaran Rp. 1.128.600.000,00 terealisasi 98,07%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak.

F7. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat

Tabel 2.16 Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	73	N/A	N/A	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.245.000.000	2.236.804.725	99,63
					Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	2.245.000.000	2.236.804.725	99,63
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.979.576.484	3.962.245.266	99,56
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.754.000.000	1.740.440.700	99,23
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	2.105.576.484	2.102.063.707	99,83



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Peraturan			
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	120.000.000	119.740.859	99,78
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			#DIV/0!
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	534.200.000	524.271.022	98,14
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			#DIV/0!
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			#DIV/0!
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			#DIV/0!
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.309.479.700	7.551.448.340	90,88
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.309.479.700	7.551.448.340	90,88
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	650.000.000	647.174.449	99,57
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	532.880.000	531.343.777	99,71
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	117.120.000	115.830.672	98,90



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Kebakaran			
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.295.090.525	2.265.580.119	98,71
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	245.613.500	232.238.553	94,55
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.401.195.210	1.389.969.486	99,20
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	337.291.290	336.249.780	99,69
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	310.990.525	307.122.300	98,76
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	722.400.000	714.022.700	98,84
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	627.193.255	619.198.200	98,73
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	95.206.745	94.824.500	99,60
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	180.647.500	175.214.900	96,99
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	52.912.500	47.898.400	90,52
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	127.735.000	127.316.500	99,67
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	95.000.000	94.930.563	99,93
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95.000.000	94.930.563	99,93
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	700.000.000	699.749.640	99,96



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	700.000.000	699.749.640	99,96
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.805.000.000	4.795.581.902	99,80
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.760.000.000	1.758.813.936	99,93
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	2.350.000.000	2.343.579.898	99,73
					Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	695.000.000	693.188.068	99,74
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	399.999.950	100,00
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000	399.999.950	100,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	463.320.000	461.323.400	99,57
					Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	463.320.000	461.323.400	99,57
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	468.700.000	461.782.211	98,52
					Pembinaan sejarah lokal dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	468.700.000	461.782.211	98,52
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	190.812.500	95,41
					Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	200.000.000	190.812.500	95,41
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100.000.000	90.735.500	90,74
					Pengelolaan museum kabupaten/kota	100.000.000	90.735.500	90,74
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.658.207.429	1.570.850.476	94,73



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.658.207.429	1.570.850.476	94,73
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.083.000.000	1.079.765.080	99,70
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.083.000.000	1.079.765.080	99,70
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.536.767.355	30.532.114.081	99,98
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.536.767.355	30.532.114.081	99,98
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	270.000.000	268.244.500	99,35
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.000.000	268.244.500	99,35
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	55.000.000	54.531.000	99,15
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	55.000.000	54.531.000	99,15



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.233.620.000	7.191.017.406	99,41
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.233.620.000	7.191.017.406	99,41
						66.450.808.993	65.443.928.708	98,48

Indeks Kebahagiaan adalah ukuran tingkat kebahagiaan penduduk, Sebagai ukuran kesejahteraan subjektif. Semakin tinggi nilai indeks kebahagiaan menunjukkan kondisi yang semakin bahagia. Pola yang searah bila indeks disandingkan dengan data indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan telah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan subjektif. Indeks kebahagiaan Tahun 2024 didukung 22 (dua puluh dua) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 66.450.808.993,00 terealisasi 98,48%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Satpol-PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

F8. Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2.17 Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	-------------------	----------	-----------	-----------



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,28	0,327	99,83	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	369.090.000	358.164.450	97,04
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.000.000	13.390.500	89,27
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	244.090.000	242.925.710	99,52
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	110.000.000	101.848.240	92,59
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	61.100.000	57.444.400	94,02
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	61.100.000	57.444.400	94,02
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.000.000	29.480.800	98,27
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	29.480.800	98,27
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000	19.490.400	97,45
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.490.400	97,45
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75.000.000	73.632.500	98,18



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	75.000.000	73.632.500	98,18
						480.190.000	464.580.050	96,75

Indeks Gini menggambarkan tingkat Pemerataan Pendapatan Masyarakat/ tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pacitan 0,327 menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat kabupaten Pacitan relatif merata. Dibandingkan dengan tahun lalu menurun 7,10% yang menandakan adanya sedikit ketimpangan pendapatan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indeks Gini tercapai 99,83% didukung oleh 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp. 480.190.000,00 terealisasi 96,75%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai penyumbang kontribusi terbesar PDRB menurut lapangan usaha.

F9. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat

Tabel 2.18 Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan	Persentase Pertumbuhan PAD	6,45	4,92	76,28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.112.338.500	3.106.167.637	99,77
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.112.338.500	3.106.167.637	99,77



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Masyarakat	Pendapatan per kapita (juta/orang/ tahun)	36.360.444	35.090.000	96,51	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	123.541.000	123.144.100	99,77
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	123.541.000	123.144.100	99,77
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.485.916.800	1.483.200.733	99,19
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.485.916.800	1.483.200.733	99,19
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30.000.000	29.683.800	100,00
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	30.000.000	29.683.800	100,00
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.807.503.480	2.792.836.054	96,56
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.807.503.480	2.792.836.054	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.000.000	167.769.320	96,15



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	167.769.320	96,15
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	235.000.000	234.670.600	99,04
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	235.000.000	234.670.600	
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.000.000	24.904.760	99,56
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.904.760	99,56
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.000.000	39.941.330	99,76
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000	39.941.330	99,76
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.000.000	29.882.450	99,54



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.882.450	99,54
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	299.332.200	298.920.846	99,82
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.332.200	298.920.846	99,82
					Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			99,82
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	127.500.000	127.128.222	99,77
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	127.500.000	127.128.222	99,77
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5.000.000	4.756.000	59,27
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.756.000	59,27
						8.491.131.980	8.463.005.852	96,59



Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat dengan indikator Prosentase Pertumbuhan PAD tercapai 76,28 % didukung oleh 1 (satu) program dengan anggaran Rp. **3.112.338.500,00** terealisasi 99,77%. Program tersebut dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. Pertumbuhan PAD bersumber dari pajak daerah 25,30%, retribusi daerah 16,12%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1,73 dan lain-lain PAD yang sah 56,84%.

Sedangkan Indikator pendapatan perkapita didukung oleh 10 (sepuluh) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran Rp. 5.378.793.480,00 terealisasi 98,51%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.

F10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Tabel 2.19 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.841.457.615	2.817.710.000	99,16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.659.682.700	7.981.815.542	92,17
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.259.682.700	3.814.129.682	89,54
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.220.000.000	2.146.433.020	96,69
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam	2.180.000.000	2.021.252.840	92,72



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.517.802.500	5.464.233.720	99,03
					Pengembangan Prasarana Pertanian	182.576.000	177.604.150	97,28
					Pembangunan Prasarana Pertanian	5.335.226.500	5.286.629.570	99,09
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.535.000.000	1.322.287.889	86,14
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.535.000.000	1.322.287.889	86,14
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.057.494.500	1.045.605.683	98,88
					Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	350.494.500	344.904.000	98,40
					Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	707.000.000	700.701.683	99,11
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.633.914.000	1.623.687.130	99,37
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	615.000.000	608.147.010	98,89



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	754.189.000	753.670.700	99,93
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	264.725.000	261.869.420	98,92
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	589.802.000	588.981.100	99,86
					Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			99,85
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	389.802.000	389.235.400	99,87
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000	199.745.700	#REF!
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	75.000.000	64.094.200	85,46
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	33.224.400	83,06
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium	20.000.000	17.410.500	87,05



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	15.000.000	13.459.300	
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	15.000.000	13.288.950	89,73
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	13.288.950	88,59
	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.355.388.082	2.417.740.000	102,65	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	92.735.000	92.479.000	99,72
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	92.735.000	92.479.000	99,72
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000	67.891.975	96,99
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	70.000.000	67.891.975	96,99
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.574.700.368	2.524.571.488	98,05
					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana			98,05



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Distribusi Perdagangan	2.574.700.368	2.524.571.488	
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	312.265.000	312.200.000	99,98
					Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	312.265.000	312.200.000	99,98
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	78.000.000	77.693.700	99,61
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	78.000.000	77.693.700	99,61
	PDRB Industri Pengolahan	862.332.423	963.480.000	111,73	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	631.000.000	623.181.327	98,76
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	631.000.000	623.181.327	98,76
					ROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.000.000	8.896.860	98,85
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000	8.896.860	98,85



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					JUMLAH TOTAL	22.851.396.068	21.811.078.914	95,45

Sasaran meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan dilihat melalui angka PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan PDRB Industri Pengolahan. Nilai PDRB Kabupaten Pacitan atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 senilai 20.656,58 miliar rupiah. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memberi sumbangan terbesar pada struktur ekonomi Kabupaten Pacitan, yaitu sebesar 28,00 persen. Lapangan usaha lain yang mempunyai sumbangan cukup tinggi adalah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,22 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 14,77 persen. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian dapat dilihat dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Nilai PDRB Kabupaten Pacitan ADHK tahun 2024 adalah sebesar 12.775,82 miliar rupiah. Berdasarkan angka PDRB ADHK, tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,34 persen. Perekonomian Kabupaten Pacitan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,64 persen.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini sebanyak 15 (lima belas) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 22.851.396.068 ,00 terealisasi 95,45%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.



F.11 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

Tabel 2.20 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,3	1,825	55,30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.804.926.000	10.246.272.690	94,83
					Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	.112.500.000	2.087.480.291	98,82
					Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	7.569.426.000	7.134.032.689	94,25
					Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1.123.000.000	1.024.759.710	91,25
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.383.349.975	1.311.336.350	94,79
					Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Dayatarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pacitan	1.383.349.975	1.311.336.350	94,79
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.500.517.500	2.384.644.017	95,37
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.500.517.500	2.384.644.017	95,37
						26.877.069.450	25.499.862.098	94,88



Indeks daya saing Pariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar 1,825. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan daya saing pariwisata antara lain peningkatan kontribusi PDB pariwisata, infrastruktur, promosi dan pengelolaan destinasi. Sedangkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini sebanyak 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 26.877.069.450,00 terealisasi 94,88%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.

F12. Meningkatnya Nilai Investasi

Table 2.21 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,8	9,31	99,31	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	5.000.000	4.764.000	95,28
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5.000.000	4.764.000	95,28
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	35.000.000	34.647.500	98,99
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.647.500	98,99



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	835.942.000	813.817.800	99,48
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	835.942.000	813.817.800	99,48
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	76.563.000	76.162.730	99,48
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	76.563.000	76.162.730	99,48
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.962.000	9.921.700	99,60
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.962.000	9.921.700	99,60



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
						1.914.972.000	1.868.705.760	97,58

ICOR merupakan Parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output). ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin tinggi angka ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi semakin rendah.

Nilai ICOR Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar 9,31, nilai ini melebihi nilai standar dimana nilai ICOR yang baik adalah 3-4. Beberapa faktor yang menyebabkan nilai ICOR tinggi, di antaranya sarana infrastruktur yang kurang memadai, birokrasi yang kurang mendukung, ongkos produksi dan tingginya biaya logistik.

Sasaran meningkatnya nilai investasi didukung oleh 5 (lima) program dengan anggaran Rp. 1.914.972.000,00 terealisasi 97,58%.

F13 Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif

Tabel 2.22 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,95	3,5	179,49	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.467.866.500	1.451.808.576	98,91
					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.002.761.500	991.843.036	98,91



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	465.105.000	459.965.540	98,89
					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	887.000.000	881.313.951	99,36
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	887.000.000	881.313.951	99,36
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	330.000.000	328.765.050	99,63
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	328.765.050	99,63
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.642.000	6.341.200	95,47
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.642.000	6.341.200	95,47
	Nilai IKM	84	84,64	100,76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	168.296.000	166.786.435	99,10
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	20.000.000	19.794.065	98,97
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.450.000	98.815.030	99,36
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.846.000	48.177.340	98,63
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	827.524.545	790944156	95,58



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	585140735	553039506	94,51
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221383810	218704650	98,79
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000	4.260.000	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.000.000	14.940.000	
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	105.200.000	103.427.586	98,32
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	32.400.000	31.647.350	97,68
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	72.800.000	71.780.236	98,60
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100.000.000	98.807.471	98,81
					Pelayanan Pencatatan Sipil	40.620.000	40.506.120	99,72
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	59.380.000	58.301.351	98,18
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.705.000	21.534.000	87,16
					Penyusunan Profil Kependudukan	24.705.000	21.534.000	87,16
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.080.000.000	4.545.882.476	89,49



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Administrasi Tata Pemerintahan	835.000.000	831.186.301	99,54
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.200.000.000	2.692.381.251	84,14
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	850.000.000	828.529.180	97,47
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	195.000.000	193.785.744	99,38
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.098.274.924	23.024.244.796	95,54
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	185.235.935	104.892.900	56,63
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	83.405.820	81.239.650	97,40
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.874.416.300	1.805.373.700	96,32
					Peningkatan Kapasitas DPRD	3.229.863.405	2.995.732.070	92,75
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.520.212.535	2.927.802.650	83,17
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	81.020.205	80.692.900	99,60
					Fasilitasi Tugas DPRD	15.124.120.724	15.028.510.926	99,37
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	729.050.530	665.789.790	91,32
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	729.050.530	665.789.790	91,32



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					JUMLAH TOTAL	33.824.559.499	32.085.645.487	94,86

Sasaran meningkatnya layanan publik yang inovatif terdapat 2 (dua) indikator yaitu indeks SPBE dan Nilai IKM. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah 3,5 dengan predikat cukup. Hasil ini lebih tinggi dari angka yang ditargetkan yaitu 1,95.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 didapatkan dari survey elektronik “SuKMa-e”Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mereplikasi inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik (SuKMa-e) dengan nilai 83,83 atau masuk kategori baik. Dengan diterapkannya SuKMa-e tersebut diharapkan kegiatan survei ini menjadi lebih efektif dan efisien karena penerima layanan tidak perlu mengisi kuesioner yang berupa lembaran kertas. Dalam melaksanakan survei, penerima layanan cukup men-scan QR Code SuKMa-e yang telah terpasang.

Sasaran meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif didukung oleh 12 (dua belas) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan anggaran Rp. 33.824.559.499,00 terealisasi 94,86% dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

F14. Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah

Tabel 2.23 Analisis Efisiensi Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	79	78,5	99,37	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	955.000.000	928.932.297	97,27
					Pengembangan Kompetensi Teknis	625.000.000	608.385.297	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	330.000.000	320.547.000	
					-			
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.584.576.000	1.326.275.722	83,70
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	939.100.000	692.694.781	
					Mutasi dan Promosi ASN	315.238.000	307.151.275	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	330.238.000	326.429.666	
						2.539.576.000	2.255.208.019	88,80

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah angka statistik yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk menggambarkan kualitas Aparatur berdasarkan 4 dimensi antara lain: kualifikasi Pendidikan, Kinerja ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Kedisiplinan ASN yang masing – masing dimensi mempunyai bobot yang berbeda. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 belum dirilis dari BKN.

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 2.539.576.000,00 terealisasi 88,80% dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.



F15. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan

Tabel 2.24 Analisis Efisiensi Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	79	67,75	85,76	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.828.797.695	1.769.027.850	96,73
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.018.719.025	1.000.352.250	98,20
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	326.958.670	312.848.700	95,68
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	483.120.000	455.826.900	94,35
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.235.000.000	2.219.340.690	99,30
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.055.000.000	1.046.810.890	99,22
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	653.880.000	649.781.300	99,37
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	526.120.000	522.748.500	99,36
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	296.362.492.363	292.089.768.080	98,56
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.062.918.000	2.039.877.745	98,88
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	546.080.000	540.418.223	98,96
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	425.920.000	424.551.646	99,68
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	292.927.574.363	288.684.920.466	98,55
					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	400.000.000	400.000.000	100,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Daerah			
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.050.000.000	1.047.325.370	99,75
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	316.900.000	315.956.300	99,70
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	390.000.000	389.771.800	99,94
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	343.100.000	341.597.270	99,56
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	240.845.000	237.929.424	98,79
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	214.568.000	211.882.250	98,75
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26.277.000	26.047.174	99,13
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.255.000	5.384.300	86,08
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.255.000	5.384.300	86,08
	Opini BPK	WTP	WTP	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.131.730.000	1.085.314.373	95,90
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	794.930.000	748.514.373	94,16
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	336.800.000	336.800.000	100,00
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	549.614.500	476.473.870	86,69
					Pendampingan dan Asistensi	549.614.500	476.473.870	86,69



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.072.000.000	1.051.007.611	98,04
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.072.000.000	1.051.007.611	98,04
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.252.281.316	2.993.551.925	92,04
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	482.484.500	429.186.598	88,95
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	800.000.000	727.014.485	90,88
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.424.000.000	1.400.916.461	98,38
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	545.796.816	436.434.381	79,96
	Maturitas SPIP	3	3	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	982.417.486.157	954.886.122.961	97,20
					JUMLAH TOTAL	1.290.146.502.031	1.285.392.609.650	99,63

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu nilai sakip, Opini BPK dan Maturitas SPIP. Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 67,75 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023. Terdapat beberapa rekomendasi terkait perencanaan dan pengukuran kinerja. Hasil Opini BPK Tahun 2024 adalah WBK. Maturitas SPIP berada pada tingkat 3 yang berarti bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) program dan 25 (dua puluh lima) dengan anggaran Rp. 1.290.146.502.031,00 terealisasi 99,63% dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.



F 16. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa

Tabel 2.25 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	41,42	48,5	117,09	PROGRAM PENATAAN DESA	150.064.000	148.414.673	#REF!
					Penyelenggaraan Penataan Desa	150.064.000	148.414.673	98,90
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	151.200.000	150.902.410	98,90
					Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	151.200.000	150.902.410	99,80
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.189.033.928	4.874.014.626	93,93
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.189.033.928	4.874.014.626	93,93
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.528.500.000	1.525.868.433	99,83
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.528.500.000	1.525.868.433	#REF!
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.134.296.121	8008574925	98,45
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.134.296.121	8008574925	98,45
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.549.106.576	1.498.998.375	96,77



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.549.106.576	1.498.998.375	96,77
						16.702.200.625	16.206.773.442	97,03

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator prosentase desa mandiri tercapai 117,09% didukung oleh 6 (enam) program dan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp 16.702.200.625,00 terealisasi 97,03%. Program ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/ atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah



kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah perwujudan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak mendapatkan anggaran dari Tugas Pembantuan sesuai kriteri Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, namun di beberapa Perangkat Daerah mendapatkan penugasan lainnya terkait pengelolaan kegiatan baik berupa anggaran kegiatan maupun pengelolaan barang untuk diserahkan ke masyarakat.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Pacitan

3.1.1. Target Kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Bantuan Benih Jagung Hibrida	110 Ha	13 Poktan di 2 Kecamatan (Donorojo, Punung)	-
2	Bantuan Benih Jagung Hibrida	500 Ha	69 Poktan di 5 Kecamatan (Punung, Pringkuku, Bandar, Tulakan)	-

3.1.2. Realisasi Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- a. Dasar Hukum : DIPA No.018.03.1.238251/2024 Tanggal 24 November 2023
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya : Kegiatan Optimalisasi Reproduksi



No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bantuan Benih Jagung Hibrida	110 Ha	13 Poktan di 2 Kecamatan (Donorojo, Punung)	-	Bentuk Barang
2	Bantuan Benih Jagung Hibrida	500 Ha	69 Poktan di 5 Kecamatan (Punung, Pringkuku, Bandar, Tulakan)	-	Bentuk Barang

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : APBN

Jumlah Anggaran : Rp

Realiasasi : Rp

3.1.3. Target Kinerja Program Perikanan

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Peralatan Pemasaran	Cool Box Merk Marvel Kapasitas 100 liter	25 buah	Poklasar Budi Luhur	RT. 01/ RW.04 Desa Sirnobojo Kec.Pacitan
2.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Sasaran Sistem Rantai Dingin	Chest Freezer Merk Polytron Type PCF-218	1unit	Poklahsar Makmur Abadi	RT. 01/ RW.04 Desa Sirnobojo Kec.Pacitan



3.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Sarana Pengolahan Abon Ikan	Chest Freezer (100 liter) Merek : Polytron/PCF-118 Tipe : PCF-118 Dilengkapi label bantuan pemerintah tahun 2024	1 unit	Poklahsar Barokah	Lingk. Teleng Kelurahan Sidoharjon Kec.Pacitan
4.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Sarana Pengolahan Ikan Asin/Terasi	Coolbox Merek :Marvel Kapasitas : 100 liter	5 unit	Poklahsar Tri Setya Bakti	Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan
5.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan		Pabrik Es Portabel Kapasitas 1 ton	1 paket	Poklahsar Peni	Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo

3.1.4. Realisasi Program Perikanan

- a. Dasar Hukum :
- b. Instasi Pemberi Tugas Pembantuan : Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Peralatan Pemasaran	Cool Box Merk Marvel Kapasitas 100 liter	25 buah	Poklasar Budi Luhur	RT. 01/ RW.04 Desa Sirnobojo Kec.Pacitan



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
2.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Sasaran Sistem Rantai Dingin	Chest Freezer Merk Polytron Type PCF-218	1unit	Poklahsar Makmur Abadi	RT. 01/ RW.04 Desa Sirnobojo Kec.Pacitan
3.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Sarana Pengolahan Abon Ikan	Chest Freezer (100 liter) Merek : Polytron/PCF-118 Tipe : PCF-118 Dilengkapi label bantuan pemerintah tahun 2024	1 unit	Poklahsar Barokah	Lingk. Teleng Kelurahan Sidoharjon Kec.Pacitan
4.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Sarana Pengolahan Ikan Asin/Terasi	Coolbox Merek :Marvel Kapasitas : 100 liter	5 unit	Poklahsar Tri Setya Bakti	Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan
5.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan		Pabrik Es Portabel Kapasitas 1 ton	1 paket	Poklahsar Peni	Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : -
 Jumlah Anggaran : Rp
 Realiasasi : Rp



3.1.5. Target Kinerja Program Perikanan

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Ditjen Perikanan Budidaya	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Yayasan Elang Biru	Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan
2.	Ditjen Perikanan Budidaya	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Makmur	Desa Bandar Kecamatan bandar
3.	Ditjen Perikanan Budidaya	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Muda Karya Gemintang	Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan

3.1.6. Realisasi Kinerja Program Perikanan

- a. Dasar Hukum :
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Ditjen Perikanan Budidaya
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Ditjen Perikanan Budidaya	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Yayasan Elang Biru	Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan
2.	Ditjen Perikanan Budidaya	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Makmur	Desa Bandar Kecamatan bandar
3.	Ditjen Perikanan Budidaya	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Muda Karya Gemintang	Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
		Bioflok				

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : -
 Jumlah Anggaran : Rp
 Realiasasi : Rp

3.1.7. Target Kinerja Program Perikanan

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	40 orang	Nelayan dari Kecamatan Pringkuku, Pacitan dan Kebonagung	Lokasi pelatihan di Dinas Perikanan Kab. Pacitan
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Bang-bang Wetan	Desa Sirnobooyo
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Gillnet monofilamen 2 inchi, 0,25 mm	50 pcs	KUB Bahari Abadi	Desa Sirnobooyo
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Mutiara	Kel. Sidoharjo
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	1 buah	KUB Rukun Mina Abadi	Kel. Sidoharjo
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Gillnet monofilamen 2 inchi, 0,25 mm	50 pcs	KUB Samodera Jaya	Desa Sirnobooyo
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	1 buah	KUB Sido Maju	Desa Kembang
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Sido Makmur	Desa Kembang



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Sumber Rejeki	Desa Kembang

3.1.8. Realisasi Kinerja Program Perikanan

- a. Dasar Hukum :
- b. Instasi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	40 orang	Nelayan dari Kecamatan Pringkuku, Pacitan dan Kebonagung	Lokasi pelatihan di Dinas Perikanan Kab. Pacitan
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Bang-bang Wetan	Desa Sirnobojo
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Gillnet monofilamen 2 inci, 0,25 mm	50 pcs	KUB Bahari Abadi	Desa Sirnobojo
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Mutiara	Kel. Sidoharjo
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	1 buah	KUB Rukun Mina Abadi	Kel. Sidoharjo
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Gillnet monofilamen 2 inci, 0,25 mm	50 pcs	KUB Samodera Jaya	Desa Sirnobojo
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	1 buah	KUB Sido Maju	Desa Kembang
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Sido Makmur	Desa Kembang
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Mesin Tempel 15 PK	2 buah	KUB Sumber Rejeki	Desa Kembang



e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : -
Jumlah Anggaran : Rp
Realiasasi : Rp

3.1.9. Target Program Merdeka Belajar Episode ke 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SD NEGERI 2 KALAK	Rt 03, Rw 02, Dusun Krajan Kulon	Kec. Donorojo
2	SD NEGERI 1 SAWAHAN	Dusun Krajan	Kec. Donorojo
3	SD NEGERI 2 MANTREN	Nglarangan	Kec. Punung
4	SD NEGERI 3 TINATAR	Krajan	Kec. Punung
5	SD NEGERI 1 BOMO	Nglarangan	Kec. Punung
6	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	Sanggrahan	Kec. Kebonagung
7	SD NEGERI 2 KETRO	Jl. Raya Pacitan-Lorok Km. 17, Ketrol, Kebonagung, Pacitan	Kec. Kebonagung
8	SD NEGERI 2 NAWANGAN	Ds. Gupakan	Kec. Nawangan
9	SD NEGERI 3 TOKAWI	Jln. Tokawi - Batuwarno Km.05	Kec. Nawangan
10	SD NEGERI 2 PENGUNGUNG	Dsn. Siki	Kec. Nawangan
11	SD NEGERI 4 SEMPU	Ds. Tanggung	Kec. Nawangan
12	SD NEGERI 2 JETIS LOR	Dusun. Dawuhan	Kec. Nawangan
13	SD NEGERI 4 JERUK	Dusun Jambu RT 1 RW 9	Kec. Bandar
14	SD NEGERI 5 JERUK	Jl. Widoro No.5 Dsn. Sidodadi	Kec. Bandar
15	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Sendang	Kec. Tegalombo
16	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tahunan	Kec. Tegalombo
17	SD NEGERI 4 KALIKUNING	Dsn. Sono	Kec. Tulakan
18	SD NEGERI 2 HADILUWIH	Hadiluwih	Kec. Ngadirojo
19	SD NEGERI KALIPELUS	Dsn. Ketrol	Kec. Kebonagung
20	SD NEGERI 1 SUDIMORO	Dusun Krajan Rt.02 Rw.01, Ds. Sudimoro	Kec. Sudimoro

3.1.10. Realisasi Program Merdeka Belajar Episode ke 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia

- a. Dasar Hukum : Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : Manual.0394/3/BS.01.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemeritahuan Pengiriman Buku Pengayaan Pendukung GLN TA 2024 dan Nilai Asetnya
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :



Daftar Sekolah Sasaran Penerima Buku GLN TA 2024
di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SD NEGERI 2 KALAK	Rt 03, Rw 02, Dusun Krajan Kulon	Kec. Donorojo
2	SD NEGERI 1 SAWAHAN	Dusun Krajan	Kec. Donorojo
3	SD NEGERI 2 MANTREN	Nglarangan	Kec. Punung
4	SD NEGERI 3 TINATAR	Krajan	Kec. Punung
5	SD NEGERI 1 BOMO	Nglarangan	Kec. Punung
6	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	Sanggrahan	Kec. Kebonagung
7	SD NEGERI 2 KETRO	Jl. Raya Pacitan-Lorok Km. 17, Ketrol, Kebonagung, Pacitan	Kec. Kebonagung
8	SD NEGERI 2 NAWANGAN	Ds. Gupakan	Kec. Nawangan
9	SD NEGERI 3 TOKAWI	Jln. Tokawi - Batuwarno Km.05	Kec. Nawangan
10	SD NEGERI 2 PENGGUNG	Dsn. Siki	Kec. Nawangan
11	SD NEGERI 4 SEMPU	Ds. Tanggung	Kec. Nawangan
12	SD NEGERI 2 JETIS LOR	Dusun. Dawuhan	Kec. Nawangan
13	SD NEGERI 4 JERUK	Dusun Jambu RT 1 RW 9	Kec. Bandar
14	SD NEGERI 5 JERUK	Jl. Widoro No.5 Dsn. Sidodadi	Kec. Bandar
15	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Sendang	Kec. Tegalombo
16	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tahunan	Kec. Tegalombo
17	SD NEGERI 4 KALIKUNING	Dsn. Sono	Kec. Tulakan
18	SD NEGERI 2 HADILUWIH	Hadiluwih	Kec. Ngadirojo
19	SD NEGERI KALIPELUS	Dsn. Ketrol	Kec. Kebonagung
20	SD NEGERI 1 SUDIMORO	Dusun Krajan Rt.02 Rw.01, Ds. Sudimoro	Kec. Sudimoro

Daftar Judul Buku, Jumlah Eksemplar, dan Nilai Aset Buku GLN TA 2024
yang Diterima oleh Setiap SD Sasaran
di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

No.	Judul Buku	Jenjang Buku	Jumlah Eksemplar	Nilai Aset Per Buku	Nilai Aset Buku
1	Sekantong Jeruk	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
2	Candi dan Topeng Ireng	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
3	Tutu si Kutu Rambut	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
4	Uli Ingin Sendiri	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
5	Adik Kecil dan Kucing	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
6	Berbeda Da Da Da Da Tidak Apa	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
7	Cipi Si Ikan Cupang	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
8	Dengar, Suara Apa Itu?	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
9	Di Mana Rumah Lutung	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
10	Jangan Dekat-Dekat!	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
11	Kalau Tikus Sakit Gigi	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
12	Kau Sedang Apa Lala?	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
13	Lihat Kebunku	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
14	Dina Bisa Cerita	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
15	Kue Lapis Harimau	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
16	Sreeet	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
17	Kuki Bangun Pagi	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
18	Mama, Aku Bukan Dia	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
19	Pemberian Pak Beruang	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
20	Ke Hutan Lindung	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
21	Bermain Teka Teki	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
22	Mewarnai Wayang untuk	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241



No.	Judul Buku	Jenjang Buku	Jumlah Eksemplar	Nilai Aset Per Buku	Nilai Aset Buku
	Bapak				
23	Ada apa sih? Ada apa sih?	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
24	Lihat! Lihat!	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
25	Banyu dan Manu	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
26	Atu dan Sandal	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
27	Kreasi Kardus Eli	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
28	Main Apa Hari Ini?	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
29	Mana Pisang Ardi	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
30	Hilo dan Bakso	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
31	Papipu dan Benih Terbang	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
32	Olahraga, Yuk!	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
33	Es Pelangi	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
34	Aku Anak Bijak Sampah	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
35	Kejutan untuk Mama	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
36	Makan Yuk	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
37	Tut Tuut Tuut Siapa Hendak Turut?	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
38	Ciko, Cimi, dan Rumah Pohon	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
39	Bayoi	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
40	Kiti dan Balon Udara	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
41	Mengapa Diam Saja?	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
42	Puka Jalan-Jalan	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
43	Selamat Tidur, Kola!	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
44	Sembunyi, Sembunyi	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
45	Suka-Suka Heidi	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
46	Terima Kasih Damki	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
47	Tutu Banting Pintu	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
48	Uuuh, Sebel!	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
49	Ayo, Lari, Kino	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
50	Buah Apa?	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
51	Hobi Baru	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
52	Khitanan Galih dan Bagja	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
53	Lulu Mencari Gong	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
54	Tongkat Kenangan Kakek	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
55	Nana Tidak Berbeda	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
56	Wuri Berani Menegur	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
57	Mengenal Rupiah	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
58	Akhirnya Didi Tahu	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
59	Orkes Kentongan	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
60	Mainan untuk Hana	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
61	Pantai untuk Semua	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
62	Maaf, Tapi Tidak!	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
63	Fokus! Fokus! Lempar!	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
64	Dung Trek Trek Dung	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
65	Siapa Dia?	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
66	Nana dan Batu Kerikil	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
67	Cerita dari Bawah Laut	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
68	Rumah Besar	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
69	Pipo Truk Sampah Keren	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
70	Ayo, Berangkat Roli	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
71	Damar Kurung Persahabatan	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
72	Nasi Basi Tidak Sia-Sia	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
73	Daun-Daun Istimewa	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241



No.	Judul Buku	Jenjang Buku	Jumlah Eksemplar	Nilai Aset Per Buku	Nilai Aset Buku
74	Film Untuk Lala	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
75	Bekal Apa Hari Ini?	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
76	Buah untuk Ragaga	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
77	Panen Istimewa	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
78	Alina dan Irama Bambu	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
79	Satwa Misteri Ayah	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
80	Yang Ini Tidak Berbahaya	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
81	Misi Kirana dan Pasukan Pramuka	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
82	Teman Untuk Tetangga Baru	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
83	Lomba Tebak Cepat	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
84	Mato si Pohon Matoa	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
85	Merah	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
86	Gara-Gara Ole	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
87	Anis Tidak Suka	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
88	Aduh, Beru Berulah Lagi	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
89	Arun Membaca Laut	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
90	Rahasia!	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
91	Kaki Emas	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
92	Cerita Putri Gema	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
93	Si Anak Dieng	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
94	Baju untuk Kak Abu	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
95	Rahasia Kotak Merah	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
96	Ransel Ajaib Ana	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
97	Pinisi Nakhoda Baruna	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
98	Kisah Daun Mangga	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
99	Sepeda Untuk Salam	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
100	Balas Budi Kupu-Kupu Biru	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
101	Hana Lapar	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
102	Sedotan Mimpi	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
103	Si Rancak Sakit	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
104	Ada Apa Di Balik Hutan	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
105	Nama Kain Nenek	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
106	Terbang Si Telok Abang!	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
107	Surat Dari Kobror	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
108	Besesandingan	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
109	Kue Apam Danang	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
110	Kue Keranjang Mei Lan	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
111	Penabuh Gong	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
112	Resep Rahasia Mida	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
113	Salam Sawu	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
114	Sagu dari Seram	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
115	Serunya Bermain Api Jagau	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
116	Fao si Pelompat Batu	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
117	Seperti Apa Kasih Sayang Itu?	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
118	Di Hati Riri	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
119	Panggil Aku Namaku	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
120	Saga Tak Sendiri	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
121	Kode Rahasia Persahabatan	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
122	Rahasia Kak Risa	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
123	Menunggu Ibu	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241



No.	Judul Buku	Jenjang Buku	Jumlah Eksemplar	Nilai Aset Per Buku	Nilai Aset Buku
124	Pesawat Kertas Persahabatan	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
125	Bajak Laut dari Matalawa	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
126	Mengusir Monster Gelitik	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
127	Apa Pesannya?	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
128	Tugas Penting Reno	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
129	Dengar Laut Mengalun	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
130	Terdampar di Dunia Plastik	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
131	Tari Gantar Kebanggaanku	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
132	Cut Nyak Meutia Pahlawanku	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
133	Mengukir Keindahan Lamin	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
134	Oddang dan Kapal Pinisi	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
135	Ada Jejak di Kaki Ciremai	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
136	Batik Tambal Anom	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
137	Cerita Anak Teluk Youtefa	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
138	Cerita Dini	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
139	Danau Laut Tador	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
140	Danis Sang Pemenang	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
141	Jeruk Sambas Maklong	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
142	Kawanku Anak Badui	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
143	Kemal dan Jejak Tradisi yang Hilang	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
144	Lamang Persaudaraan	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
145	Layang-Layang Ilham	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
146	Nurin, Si Anak Elang Penjelajah Nusantara	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
147	Pejuang dari Palagan	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
148	Petualangan Sangga	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
149	Rumah Bolon	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
150	Si Boke	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
151	Topeng Kayu Sudar	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
152	Kapal Kapten Alka	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
153	Penculikan Naya	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
154	Mencari Bunga Bintangur	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
155	Hari Seru Gebi	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
156	Cita-Cita Anya	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
157	Sabai Nan Aluih	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
158	Rumah Dian Terang Sekali	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
159	Perahu Nenek Moyangku	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
160	Dongeng Untuk Santi	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
161	Aku Sudah Besar	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
162	Gambar Lucu Mika	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
163	Biji Merah Luna	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
164	Kue Kimu	A	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
165	Kacamata Super Opin (Opin's Super Glasses)	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
166	Sore Seru Suri (Suri's Exciting Day)	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
167	Apa yang Lebih Seru?	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
168	Di Mana Kacang Sipet	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
169	Namaku Kali	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
170	Apa Itu?	B1	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
171	Rumah Wortel	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
172	Tiup! Tiup!	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241



No.	Judul Buku	Jenjang Buku	Jumlah Eksemplar	Nilai Aset Per Buku	Nilai Aset Buku
173	Selamatkan Dirimu!	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
174	Naik-Naik ke Puncak Bukit	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
175	Biji Semangka Ajaib (The Magic of Watermelon Seed)	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
176	Kaus Kaki Bebek Bercerita	B2	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
177	Abdul dan Harimau (Abdul and The Tiger)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
178	Putri Ikan dan Parana (The Fish Princess and Parana)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
179	Ini Atau Itu?	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
180	Nanti Saja	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
181	Rumah Dendeng (Danu's Jerky Factory)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
182	Coba Dulu Tora!	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
183	Tidak Bisa Tidak	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
184	Benda-Benda Berta (Berta's Noken)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
185	Feng (Feng)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
186	Julia dan Bola Pinang (Julia and Areca Nut Ball)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
187	Permainan Rahasia Minul	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
188	Kotak Petualang (The Adventurous Box)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
189	Bili dan Soli (Bili and Soli)	B3	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
190	Witan dan Negeri Arana	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
191	Si Cemong Coak	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
192	Pilus Rumput Laut untuk Rasi	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
193	Putri di Dalam Hutan	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
194	Karena Anggrek Ibu	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
195	Petualangan Bena dan Mima (Bena and Mima's Adventure)	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
196	Itam dan U (Tsunami)	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
197	Murai Bintik (The Speckled Magpie)	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
198	Mau Masak Apa, Lintang? (What Will You Cook, Lintang?)	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
199	Buldoser Beti (Beti's Bulldozer)	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
200	Kemiri untuk Tuto (Candlenuts for Tuto)	C	3 eksemplar	Rp4.899,24746	Rp14.697,74241
Total Nilai Aset Buku =			600 eksemplar	Rp2.939.548,48	

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana	: -
Jumlah Anggaran	: Rp 2.939.548,48
Realiasasi	: Rp 2.939.548,48



Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Pacitan

No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Direktorat Jenderal Tananaman Pangan	DIPA No.018.03.1.23825 1/2024 Tanggal 24 November 2023	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rincian Kegiatan : 1. Bantuan Benih Jagung Hibrida	13 Poktan di 2 Kecamatan (Donorojo, Punung) 69 Poktan di 5 Kecamatan (Punung, Pringkuku, Pacitan, Bandar, Tulakan)	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				Bentuk Barang		



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan		Program Ketersediaan, - Rincian Kegiatan : 1. Peralatan Pemasaran 2. Sasaran Sistem Rantai Dingin 3. Sarana Pengolahan Abon Ikan 4. Sarana Pengolahan Ikan Asin/Terasi	5 Poklahsar 1. RT. 01/ RW.04 Desa Sirnobo y Kec.Paci tan 2. Lingk. Teleng Keluraha n Sidoharj on Kec.Paci					Bentuk Barang		



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				tan 3. Desa Sirnoboy o, Kecamat an Pacitan 4. Desa Ngadiroj o Kecamat an Ngadiroj o							
3	Ditjen		Program	3 Yayasan	Dinas				Bentuk		



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	Perikanan Budidaya		Ketersediaan, - Rincian Kegiatan : 1. Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	1. Desa Banguns ari Kecamat an Pacitan 2. Desa Bandar Kecamat an Bandar 3. Desa Wonoant i Kecamat	Perikanan Kabupaten Pacitan				Barang		



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				an Tulakan							
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Program Ketersediaan, - Rincian Kegiatan : 1. Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	9 KUB 1. Desa Sirnobo yo 2. Kel. Sidoharj o 3. Desa Kemban g	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan				Bentuk Barang		
5	Kementerian Pendidikan,	Surat dari Kementerian	Merdeka Belajar Episode ke 23	1. SDN 2 Kalak	Dinas Pendidikan		Rp 2.939.548,4				



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : Manual.0394/3/BS. 01.00/2024 Tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemeberitahuan Pengiriman Buku Pengayan Pendukung GLN TA 2024 dan Nilai Asetnya	Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia Rincian Kegiatan : 1. Pembagian Buku	2. SDN 1 Sawahan 3. SDN 2 Mantren 4. SDN 3 Tinatar 5. SDN 1 Bomo 6. SDN 2 Sanggrahan 7. SDN 2 Ketro 8. SDN 2	Kabupaten Pacitan		8				



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nawang 9. SDN 3 Tokawi 10. SDN 2 Penggu ng 11. SDN 4 Sempu 12. SDN 2 Jetis Lor 13. SDN 4 Jeruk 14. SDN 5 Jeruk							



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15. SDN 2 Tahun n							
				16. SDN 3 Tahun n							
				17. SDN 4 Kalikuni ng							
				18. SDN 2 Hadiluwi h							
				19. SDN Kalipelu s							



No	K/PLNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARA N	REALISASI ANGGARA N	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				20. SDN 1 Sudimoro							



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Pacitan

3.2.1. Target Kinerja Program Optimalisasi Reproduksi

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi>Nama Kelompok
1	Semen beku limosin	16.203 dosist}}t	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan
2	Semen beku simental	13.869 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan
3	Semen beku brahman	500 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan
4	Semen beku belgian blue	100 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan
5	Nitrogen Cair	11.550 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan

3.2.2. Realisasi Program Optimalisasi Reproduksi

- a. Dasar Hukum : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2024 Nomor 12313/Kpts/HK.210/F/12/2023
- b. Instasi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Semen beku limosin	16.203 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan	
2	Semen beku simental	13.869 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan	
3	Semen beku brahman	500 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan	
4	Semen beku belgian blue	100 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan	



No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
5	Nitrogen Cair	11.550 dosis	Semua wilayah se Kabupaten Pacitan	
Jumlah				

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber Dana

: DIPA APBN Satker Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor : SP
DIPA-018.06.4.059181/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan APBD Prov Jawa Timur
- Jumlah Anggaran

: Rp
- Realisasi

: Rp

3.2.3. Target Kinerja Program

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Intensifikasi Tembakau (Bantuan Pupuk NPK)	5.600 Kg	1. Poktan Rukun III Desa Kedungbendo Kec. Arjosari 2. Tri Karsa III Desa Gembuk Kec. Kebonagung 3. Poktan Mekar Sari VII Desa Sedeng Kec. Pacitan 4. Poktan Sido Makmur V Desa Sidoharjo Kec. Pacitan 5. Poktan Sido Dadi Grogol Desa Tahunan Kec.	Diberikan dalam bentuk barang



No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
			Tegalombo	

3.2.4. Realisasi Program

- a. Dasar Hukum : DIPA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No. A.1/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Perkebnunan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya :

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Intensifikasi Tembakau (Bantuan Pupuk NPK)	5.600 Kg	1. Poktan Rukun III Desa Kedungbendo Kec. Arjosari 2. Tri Karsa III Desa Gembuk Kec. Kebonagung 3. Poktan Mekar Sari VII Desa Sedeng Kec. Pacitan 4. Poktan Sido Makmur V Desa Sidoharjo Kec. Pacitan 5. Poktan Sido Dadi Grogol Desa Tahunan Kec. Tegalombo	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang



No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
Jumlah					

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber Dana : DBHCHT Provinsi Jawa Timur
- Jumlah Anggaran : Rp
- Realisasi : Rp

3.2.5. Target Program Penyuluhan Pertanian

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Bimtek Pembibitan, Budidaya Tanaman Nilam	3 Kali x 30 orang	Poktan Sumber Pangan Desa Sudimoro Kec. Sudimoro	20.603.000
2	Bibit Tanaman Nilam	10.000 batang	Poktan Sumber Pangan Desa Sudimoro Kec. Sudimoro	Diberikan dalam bentuk barang

3.2.6. Realisasi Program Penyuluhan Pertanian

- a. Dasar Hukum : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No. 500.8.2.3/4402/121.2/2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bimtek Pembibitan, Budidaya Tanaman Nilam	3 Kali x 30 orang	Poktan Sumber Pangan Desa Sudimoro Kec. Sudimoro	20.603.000	20.603.000
2	Bibit Tanaman Nilam	10.000 batang	Poktan Sumber Pangan Desa Sudimoro Kec. Sudimoro	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang



- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber Dana : DBHCHT Provinsi Jawa Timur
 - Jumlah Anggaran : Rp. 20.603.000
 - Realisasi : Rp. 20.603.000

3.2.7. Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Bimtek Antisipasi Dampak Perubahan Iklim pada Lahan Perkebunan melalui Peningkatan Bahan Organik	2 Kali x 25 Orang	Poktan Setyo Maju 6 Desa Gawang Kec.Kebonagung	10.161.000
2	Pupuk Organik Pembenah Tanah	1.000 kg	Poktan Setyo Maju 6 Desa Gawang Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang
3	Cangkul	15 Buah	Poktan Setyo Maju 6 Desa Gawang Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang

3.2.8. Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Dasar Hukum : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No. 500.8.2.3/5272/121.5/2024 Tanggal 15 November 2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bimtek Antisipasi Dampak Perubahan Iklim pada Lahan	2 Kali x 25 Orang	Poktan Setyo Maju 6 Desa	10.161.000	10.161.000



No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
	Perkebunan melalui Peningkatan Bahan Organik		Gawang Kec.Kebonagung		
2	Pupuk Organik Pembenh Tanah	1.000 kg	Poktan Setyo Maju 6 Desa Gawang Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
3	Cangkul	15 Buah	Poktan Setyo Maju 6 Desa Gawang Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
Jumlah					

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber Dana

: DBHCHT Provinsi Jawa Timur
- Jumlah Anggaran

: Rp. 10.161.000
- Realisasi

: Rp. 10.161.000

3.2.9. Target Program

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Pelatihan Standar Regulasi Benih Perkebunan Komoditi Tembakau	1 Kali x 40 orang	BPP Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang

3.2.10. Realisasi Program

- a. Dasar Hukum : DPA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No.DPAA/A.3/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2024, Tanggal 5 Oktober 2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan



d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :
Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelatihan Standar Regulasi Benih Perkebunan Komoditi Tembakau	1 Kali x 40 orang	BPP Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
Sumber Dana : DBHCHT Provinsi Jawa Timur
Jumlah Anggaran :
Realisasi :

3.2.11. Target Program

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1.	Sekolah Lapang Agribisnis	20 peserta 4 x pertemuan	Poktan Sido Makmur 6 Ds. Worawari Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang
2.	Pengembangan Tanaman Kakao	16.800 batang	1. Poktan Rukun Makmur V Ds. Gayuhan Kec. Arjosari (8.000 batang) 2. Poktan Sido Mulyo I Ds. Mangunharjo Kec. Arjosari (4.000 batang) 3. Poktan Setyo Maju 4 Ds. Gawang Kec. Kebonagung (4.800 batang)	Diberikan dalam bentuk barang
3.	Bimtek Budidaya, Penanganan Panen dan Pascapanen Kakao	25 peserta	Ds. Gayuhan, Kec. Arjosari	Diberikan dalam bentuk barang



No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
4.	Pengembangan Tanaman Kopi	1.000 batang	Poktan Sido Makmur 5 Ds. Worawari Kec. Kebonagug	Diberikan dalam bentuk barang
5.	Sosialisasi Pembinaan dan Sertifikasi Dsa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	25 peserta	Poktan Akur X Ds. Temon Kec. Arjosari	Diberikan dalam bentuk barang
6.	Pra Sertifikasi Desa Organik Komoditas Aren	25 ekor kambing PE dan 1 Unit bangunan rumah kompos	Poktan Akur X Ds. Temon Kec. Arjosari	Diberikan dalam bentuk barang
Jumlah				

3.2.12. Realisasi Program

- a. Dasar Hukum :
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
 - 1. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (No. 1-4)
 - 2. Balai Besar Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan Surabaya, Ditjen Perekebunan Kementerian Pertanian (No .5-6)
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya :

Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1.	Sekolah Lapang Agribisnis	20 peserta 4 x pertemuan	Poktan Sido Makmur 6 Ds. Worawari Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
2.	Pengembangan Tanaman Kakao	16.800 batang	1. Poktan Rukun Makmur V Ds. Gayuhan Kec.	Diberikan dalam	Diberikan dalam bentuk



No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
			Arjosari (8.000 batang) 2. Poktan Sido Mulyo I Ds. Mangunharjo Kec. Arjosari (4.000 batang) 3. Poktan Setyo Maju 4 Ds. Gawang Kec. Kebonagung (4.800 batang)	bentuk barang	barang
3.	Bimtek Budidaya, Penanganan Panen dan Pascapanen Kakao	25 peserta	Ds. Gayuhan, Kec. Arjosari	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
4.	Pengembangan Tanaman Kopi	1.000 batang	Poktan Sido Makmur 5 Ds. Worawari Kec. Kebonagung	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
5.	Sosialisasi Pembinaan dan Sertifikasi Dsa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	25 peserta	Poktan Akur X Ds. Temon Kec. Arjosari	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
6.	Pra Sertifikasi Desa Organik Komoditas Aren	25 ekor kambing PE dan 1 Unit bangunan rumah kompos	Poktan Akur X Ds. Temon Kec. Arjosari	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang
Jumlah					

e. Sumber dan Jumlah Anggaran Tanaman:

Sumber Dana :
 Jumlah Anggaran : Rp.
 Realisasi : Rp.



3.2.13. Target Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/ Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Traktor Capung	1 unit	Poktan Akur IV	-
	Cultivator	1 unit	Ds Temon	
	Pompa Air	1 unit	Kec. Arjosari	

3.2.14. Realisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Dasar Hukum : DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Traktor Capung	1 unit	Poktan Akur IV	-	Bentuk Barang
	Cultivator	1 unit	Ds Temon		
	Pompa Air	1 unit	Kec. Arjosari		
Jumlah					

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber Dana : APBD I
 - Jumlah Anggaran : Rp.
 - Realisasi : Rp.



3.2.15. Target Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)
1	Bantuan Benih Jagung Hibrida	1.000 Ha	88 Poktan di 6 Kecamatan (Donorojo, Pacitan, Tegalombo, Bandar, Tulakan,Sudimoro)	-
Jumlah				

3.2.16. Realisasi Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- a. Dasar Hukum : DIPA-018.03.4.059178/2024 Tanggal 3 September 2024 (revisi 8)
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :
Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bantuan Benih Jagung Hibrida	1.000 Ha	88 Poktan di 6 Kecamatan (Donorojo, Pacitan, Tegalombo, Bandar, Tulakan,Sudimoro)	-	Bentuk Barang
Jumlah					

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : APBN TP Prov

Jumlah Anggaran : Rp

Realisasi : Rp



3.2.17. Target Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi>Nama Kelompok
1	Vaksin PMK	247.170 dosis	Semua wilayah Kabupaten Pacitan
2	Obat-obatan	2 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
3	Vaksin LSD	64.000 dosis	

3.2.18. Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

- a. Dasar Hukum :
 - DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Nomor : SP DIPA018.06.4.059181/2024 tanggal 24 November 2023
 - Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 100.3.3/0026/122.3/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Petugas atau Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian dan Penanggulangan PMK di Jawa Timur tahun 2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

Kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular (PMK dan LSD)

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Vaksin PMK	247.170 dosis	Semua wilayah Kabupaten Pacitan	4.958.896.570
2	Obat-obatan	2 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	323.298.900
3	Vaksin LSD	64.000 dosis		64.500.000



Jumlah	5.346.695.470
---------------	----------------------

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber Dana : APBD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2024
 - Jumlah Anggaran : Rp
 - Realisasi : Rp 5.346.695.470

3.2.19. Target Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Target	Lokasi/ Nama Kelompok
1	Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)	- Kambing PE Betina : 27 ekor - Kambing Jantan : 3 ekor - Pakan Konsentrat : 600 kg	Dusun Sidomakmur, Desa Kasihan, Kec. Tegalombo / Poktan Among Tani V

3.2.20. Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024

- a. Dasar Hukum : DPA-OPD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
 Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :



Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan,
Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)	- Kambing PE Betina : 27 ekor - Kambing Jantan : 3 ekor - Pakan Konsentrat : 600 kg	Dusun Sidomakmur, Desa Kasihan, Kec. Tegalombo / Poktan Among Tani V	

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber Dana

: APBD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- Jumlah Anggaran

: Rp
- Realisasi

: Rp

3.2.21. Target Program Pembinaan Keluarga Berencana

No	Rincian Kegiatan	Barang	Target	Lokasi
1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Implant	4000.00 Set	Fasilitas Kesehatan di Seluruh Kabupaten Pacitan
		Suntik	6000.00 Vial	
		Hand Sanitizer	48.00 Buah	
		Sarung tangan steril	2400.00 Pasang	
		Sarung tangan steril	2400.00 Pasang	
		Sarung tangan steril	2400.00 Pasang	
		Syringe 3 cc	6000.00 Buah	
		Lidocain	4000.00 Buah	
		Sputit	4000.00 Buah	
		Dental Scalpe Blade	1000.00 Buah	
		Obat-obatan Lainnya	4000.00 Buah	
		Kasa Steril	4000.00 Set	



No	Rincian Kegiatan	Barang	Target	Lokasi
		Dermafik	4000.00 Buah	
		Masker	1000.00 Buah	
		Masker	250.00 Buah	
		Obat-obatan Lainnya	100.00 Buah	
		Suntik	3500.00 Vial	
		Suntik	3500.00 Vial	
		Asam Mefenamat	5000.00 Buah	
		Amoxilin	1000.00 Buah	
		Syringe 3 cc	7000.00 Buah	
		Dental Scalpe Blade	2000.00 Buah	
		Alkohol 70%	50.00 Buah	
		Safety Box	500.00 Buah	
		Hand Sanitizer	48.00 Buah	
		Masker	2000.00 Buah	
		IUD Coper	500.00 Buah	
		Pil KB	300.00 Siklus	
		Pil KB	300.00 Siklus	
		Kondom	48.00 Lusin	
		Dermafik	80.00 Buah	
		Kasa Steril	100.00 Set	
		Sarung tangan steril	100.00 Buah	
		Sarung tangan steril	100.00 Buah	
		Sarung tangan steril	100.00 Buah	
		Sput	100.00 Buah	
		Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana	75.00 Set	
		Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana	1.00 Botol	
		Amoxilin	2000.00 Buah	



No	Rincian Kegiatan	Barang	Target	Lokasi
		IUD Coper	1000.00 Buah	
		Suntik	5000.00 Vial	
		Suntik	5000.00 Vial	
		Pil KB	500.00 Siklus	
		Pil KB	500.00 Siklus	
		Kondom	288.00 Lusin	
		Alkohol 70%	24.00 Buah	
		Alkohol 70%	48.00 Buah	
		Amoxilin	2000.00 Buah	
		Asam Mefenamat	2000.00 Buah	
		Dental Scalpe Blade	2000.00 Buah	
		Dermafik	1050.00 Buah	
		Lidocain	2000.00 Buah	

3.2.22. Realisasi Program Pembinaan Keluarga Berencana

- a. Dasar Hukum :
 - Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
 - Peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional nomor 9 tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : BKKBN Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

Realisasi Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024



No	Rincian Kegiatan	Barang	Volume	Lokasi	Realisasi Biaya (Rp)
1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Implant	4000.00 Set	Fasilitas Kesehatan di Seluruh Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)
		Suntik	6000.00 Vial		
		Hand Sanitizer	48.00 Buah		
		Sarung tangan steril	2400.00 Pasang		
		Sarung tangan steril	2400.00 Pasang		
		Sarung tangan steril	2400.00 Pasang		
		Syringe 3 cc	6000.00 Buah		
		Lidocain	4000.00 Buah		
		Sput	4000.00 Buah		
		Dental Scalpe Blade	1000.00 Buah		
		Obat-obatan Lainnya	4000.00 Buah		
		Kasa Steril	4000.00 Set		
		Dermafik	4000.00 Buah		
		Masker	1000.00 Buah		
		Masker	250.00 Buah		
		Obat-obatan Lainnya	100.00 Buah		
		Suntik	3500.00 Vial		
		Suntik	3500.00 Vial		
		Asam Mefenamat	5000.00 Buah		
		Amoxilin	1000.00 Buah		
		Syringe 3 cc	7000.00 Buah		
		Dental Scalpe Blade	2000.00 Buah		
		Alkohol 70%	50.00 Buah		
		Safety Box	500.00 Buah		
		Hand Sanitizer	48.00 Buah		
		Masker	2000.00 Buah		
		IUD Coper	500.00 Buah		
		Pil KB	300.00 Siklus		
		Pil KB	300.00 Siklus		



No	Rincian Kegiatan	Barang	Volume		Lokasi	Realisasi Biaya (Rp)
		Kondom	48.00	Lusin		
		Dermafik	80.00	Buah		
		Kasa Steril	100.00	Set		
		Sarung tangan steril	100.00	Buah		
		Sarung tangan steril	100.00	Buah		
		Sarung tangan steril	100.00	Buah		
		Sput	100.00	Buah		
		Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana	75.00	Set		
		Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana	1.00	Botol		
		Amoxilin	2000.00	Buah		
		IUD Coper	1000.00	Buah		
		Suntik	5000.00	Vial		
		Suntik	5000.00	Vial		
		Pil KB	500.00	Siklus		
		Pil KB	500.00	Siklus		
		Kondom	288.00	Lusin		
		Alkohol 70%	24.00	Buah		
		Alkohol 70%	48.00	Buah		
		Amoxilin	2000.00	Buah		
		Asam Mefenamat	2000.00	Buah		
		Dental Scalpe Blade	2000.00	Buah		
		Dermafik	1050.00	Buah		
		Lidocain	2000.00	Buah		

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber Dana

: APBN Tahun 2024
- Jumlah Anggran

: Rp
- Realisasi

: Rp



3.2.23. Target Program Perikanan

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Rejo Mulyo	Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Sedyo Mulyo	Desa Mangunharjo Kecamatan Arjosari
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Berkah Abadi	Desa Nanggung Kecamatan Pacitan
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Wedana	Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Suro Joyo	Desa Mantren Kecamatan Punung
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Tirta Karya Mukti	Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Arta	Desa Gembong Kecamatan Arjosari
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Kebon Lele Mandiri	Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Kumis Jaya Sejahtera	Desa Worawari Kecamatan Kebonagug
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Sumber Padas	Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Peti Koin Bermantra	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Sekar Mina 2	Desa Tremas Kecamatan Arjosari
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Peti Koin Bermantra	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Tirto Ayem	Desa Gondang Kecamatan Nawangan
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Agropolitan Lele	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Giri Terto	Desa Tokawi Kecamatan Nawangan
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdanan Muiya Ananda Cendekia	Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	10 orang	Nelayan dari Kecamatan Pringkuku dan Pacitan	Lokasi pelatihan di Pelabuhan Mayangan, Probolinggo
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Perbaikan Mesin Kapal Perikanan	5 orang	Nelayan dari Kecamatan Pacitan	Lokasi pelatihan di Pelabuhan Mayangan, Probolinggo
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Perakitan Gillnet Millenium	30 orang	Nelayan dari Kecamatan Pringkuku	Lokasi pelatihan di Desa Watukarung
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Perijinan	Pengurusan Tanda Daftar Kapal Perikanan	335 buah	Nelayan dari 7 kecamatan pesisir	Lokasi pelayanan di Pelabuhan Tamperan untuk nelayan se-Kabupaten Pacitan yang mengajukan perijinan
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Review RZWP3K Provinsi Jawa Timur	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (bahan review RZWP3K Provinsi Jawa Timur)	7 kecamatan pesisir	Dinas Perikanan, kecamatan dan desa pesisir	7 kecamatan pesisir
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Beach Clean Up	Gerakan bersih pantai bersama masyarakat dan instansi		Nelayan dan masyarakat pesisir	Pantai Pancer Etan, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	TARGET	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
			terkait dan mendapatkan peralatan kebersihan yaitu :			
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Beach Clean Up	Gerakan bersih pantai bersama masyarakat dan instansi terkait dan mendapatkan peralatan kebersihan yaitu :		Nelayan dan masyarakat pesisir	Pantai Wonocaki, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Kampung Nelayan Bersih	Sosialisasi tentang Penanganan Kebersihan di Kampung Nelayan. Dan mendapatkan bantuan berupa :		Nelayan dan masyarakat pesisir	Dusun Kiteran, Desa Kembang Kecamatan Pacitan
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Festival Nelayan Jawa Timur	Dinamika Kelompok Nelayan dalam bentuk Perlombaan Yel-yel, Cerdas Cermat dan Ketangkasan Nelayan	50 nelayan	7 kecamatan pesisir	Pelaksanaan acara di PPP Tamperan

3.2.24. Realisasi Program Perikanan

- a. Dasar Hukum :
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
- d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya :

NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Rejo Mulyo	Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Sedyo Mulyo	Desa Mangunharjo Kecamatan Arjosari
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Berkah Abadi	Desa Nanggung Kecamatan Pacitan
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Wedana	Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Suro Joyo	Desa Mantren Kecamatan Punung
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Tirta Karya Mukti	Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Arta	Desa Gembong Kecamatan Arjosari
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Kebon Lele Mandiri	Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Kumis Jaya Sejahtera	Desa Worawari Kecamatan Kebonagug
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Sumber Padas	Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Peti Koin Bermantra	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Sekar Mina 2	Desa Tremas Kecamatan Arjosari
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Peti Koin Bermantra	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Tirto Ayem	Desa Gondang Kecamatan Nawangan



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Agropolitan Lele	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdakan Mina Giri Terto	Desa Tokawi Kecamatan Nawangan
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok	Kolam terpal bundar, benih, pakan dan sarpras	1 paket	Pokdanan Muiya Ananda Cendekia	Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	10 orang	Nelayan dari Kecamatan Pringkuku dan Pacitan	Lokasi pelatihan di Pelabuhan Mayangan, Probolinggo
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Perbaikan Mesin Kapal Perikanan	5 orang	Nelayan dari Kecamatan Pacitan	Lokasi pelatihan di Pelabuhan Mayangan, Probolinggo
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Pelatihan/Bimtek Nelayan	Pelatihan Perakitan Gillnet Millenium	30 orang	Nelayan dari Kecamatan Pringkuku	Lokasi pelatihan di Desa Watukarung
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Perijinan	Pengurusan Tanda Daftar Kapal Perikanan	335 buah	Nelayan dari 7 kecamatan pesisir	Lokasi pelayanan di Pelabuhan Tamperan untuk nelayan se-Kabupaten Pacitan yang mengajukan perijinan
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Review RZWP3K Provinsi Jawa Timur	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (bahan review RZWP3K Provinsi Jawa Timur)	7 kecamatan pesisir	Dinas Perikanan, kecamatan dan desa pesisir	7 kecamatan pesisir
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Beach Clean Up	Gerakan bersih pantai bersama masyarakat dan instansi terkait dan mendapatkan peralatan kebersihan yaitu :		Nelayan dan masyarakat pesisir	Pantai Pancer Etan, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Beach Clean Up	Gerakan bersih pantai bersama masyarakat dan instansi		Nelayan dan masyarakat pesisir	Pantai Wonocaki, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo



NO	BANTUAN DARI	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
			terkait dan mendapatkan peralatan kebersihan yaitu :			
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Kampung Nelayan Bersih	Sosialisasi tentang Penanganan Kebersihan di Kampung Nelayan. Dan mendapatkan bantuan berupa :		Nelayan dan masyarakat pesisir	Dusun Kiteran, Desa Kembang Kecamatan Pacitan
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Festival Nelayan Jawa Timur	Dinamika Kelompok Nelayan dalam bentuk Perlombaan Yel-yel, Cerdas Cermat dan Ketangkasan Nelayan	50 nelayan	7 kecamatan pesisir	Pelaksanaan acara di PPP Tamperan

- a. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber Dana : -
- Jumlah Anggran : Rp
- Realisasi : Rp



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	Pertanian	Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2024 Nomor 12313/Kpts/HK.210/F/12/2023	Program Optimalisasi Reproduksi Rincian Kegiatan 1. Semen beku limosin 2. Semen beku simental 3. Semen beku brahman 4. Semen beku belgian blue 5. Nitrogen Cair	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan				
2	Pertanian	DIPA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No. A.1/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024	Program Rincian Kegiatan Intensifikasi Tembakau (Bantuan Pupuk NPK)	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang		
3	Pertanian	Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No. 500.8.2.3/4402/121.2/2024	Program Penyuluhan Pertanian Rincian Kegiatan Bimtek Pembibitan,	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten	Rp 20.603.000	Rp 20.603.000		



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
			Budidaya Tanaman Nilam Bibit Tanaman Nilam		Pacitan				
4	Pertanian	Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No. 500.8.2.3/5272/121.5/2024 Tanggal 15 November 2024	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Daerah Rincian Kegiatan 1. Bimtek Antisipasi Dampak Perubahan Iklim pada Lahan Perkebunan melalui Peningkatan Bahan Organik 2. Pupuk Organik Pembenah Tanah 3. Cangkul	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Rp 10.161.000	Rp 10.161.000		



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
5	Pertanian	DPA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur No.DPAA/A.3/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2024, Tanggal 5 Oktober 2024	Program Rincian Kegiatan Pelatihan Standar Regulasi Benih Perkebunan Komoditi Tembakau	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang		
6	Pertanian		Program Rincian Kegiatan 1. Sekolah Lapang Agribisnis 2. Pengembangan Tanaman Kakao 3. Bimtek Budidaya, Penanganan Panen dan Pascapanen Kakao 4. Pengembangan Tanaman Kopi 5. Sosialisasi Pembinaan dan Sertifikasi Dsa Pertanian Organik Berbasis Komoditi	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang		



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
			Perkebunan 6. Pra Sertifikasi Desa Organik Komoditas Aren						
7	Pertanian	DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rincian Kegiatan 1. Traktor Capung 2. Cultivator 3. Pompa Air	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang		
8	Pertanian	DIPA-018.03.4.059178/2024 Tanggal 3 September 2024 (revisi 8)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rincian Kegiatan 1. Bantuan Benih Jagung Hibrida	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Diberikan dalam bentuk barang	Diberikan dalam bentuk barang		



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
9	Pertanian	- DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Nomor : SP DIPA018.06.4.059181/2024 tanggal 24 November 2023 - Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 100.3.3/0026/122.3/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Petugas atau Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian dan Penanggulangan PMK di Jawa Timur tahun 2024	Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Rincian Kegiatan 1. Vaksin PMK 2. Obat-obatan 3. Vaksin LSD	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Rp 5.346.695.470	Rp 5.346.695.470		
10	Pertanian	DPA-OPD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024	Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2024 Rincian Kegiatan 1. Kegiatan Program Pemberdayaan	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan				



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
			Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)						
11	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	- Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga - Peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional nomor 9 tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana Rincian Kegiatan 1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan				
12	Perikanan	-	Program Rincian Kegiatan: 1. Agropilitan Lele 2. Bimtek Sinergitas Budidaya Lele Bioflok 3. Peti Koin	Kab. Pacitan	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan				



No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
			Bermantra 4. Pelatihan/Bimtek Nelayan 5. Review RZWP3K Provinsi Jawa Timur 6. Kampung Nelayan Bersih 7. Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila Sistim Bioflok 8. Beach Clean Up 9. Perijinan 10. Kegiatan Festival Nelayan Jawa Timur						



3.3. Permasalahan dan Kendala

1. Program Optimalisasi Reproduksi
 - Eartag banyak yang hilang dan rusak, sehingga pelaporan kegiatan tidak dapat berjalan maksimal
 - Pelaporan kegiatan melalui aplikasi identik PKH banyak mengalami kendala sehingga update capaian kegiatan menjadi terlambat
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
 - Ada beberapa peternak yang tidak berkenan jika dilakukan vaksinasi pada ternaknya
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - Untuk pengambilan alat dan obat kontrasepsi harus ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sedangkan anggaran pengambilan alat dan obat kontrasepsi tidak tersedia di anggaran BOKB, hanya untuk distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas Kesehatan.
 - Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi faskes tidak semuanya tersedia di Gudang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mengambil, mendistribusikan serta melaporkan alokon.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

1. Program Optimalisasi Reproduksi
 - Eartag yang hilang dan rusak dapat diganti dan dilaporkan kerusakan/hilang dan penggantinya di aplikasi Identik PKH
 - Pelaporan kegiatan dapat melalui aplikasi iSIKHNAS maupun identik PKH dan dapat menggunakan spreadsheet sehingga upaya percepatan pelaporan kegiatan.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
 - Dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat vaksinasi, reaksi post vaksinasi dan cara penanganannya
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - Mohon anggaran untuk pengambilan alat dan obat kontrasepsi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sehingga proses pelayanan tidak mengalami kendala.
 - Penambahan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidangnya.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan Perhitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dihitung dengan menggunakan indeks pencapaian SPM. Indeks pencapaian SPM tersebut meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Diharapkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pemerintah daerah dapat mencapai nilai maksimal sesuai dengan kemampuan dari masing-masing daerah, sehingga pelayanan dasar ke masyarakat dapat maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan pelaksanaan penerapan SPM di daerah, dengan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan untuk Kabupaten Pacitan, terisi atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Kabupaten usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	100 %	52.443.132.450	Setiap Tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
		Pendidikan PAUD			
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Kabupaten usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100 %	31.594.403.000	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Kabupaten usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100 %	2.958.742.500	Setiap Tahun

4.1.3. Realisasi

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan tahun 2024 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga kabupaten usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	13.414	14.393	93,89 %
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga kabupaten usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	66.326	73.097	97,69 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga kabupaten usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.282	534	96,47 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan masuk dalam kategori Tuntas Utama, dengan total capaian 96,02 %.



4.1.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Pendidikan sebagai pengampu bidang urusan Pendidikan ialah sebesar Rp.589.676.054.083 (34,7 % dari APBD). Sedangkan alokasi anggaran penerapan SPM pada dinas Pendidikan ialah sebesar Rp110.361.850.640 (0,65 % dari APBD dan 18,72 % dari anggaran Dinas Pendidikan). Adapun rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan ialah :

Tabel 4.3
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	102.696.710.408,00	98.670.384.980,00	96,08%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	52.443.132.450,00	50.537.893.616,00	96,37%
1.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	75.000.000,00	74.511.600,00	99,35%
1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.510.368.000,00	1.350.258.800,00	89,40%
1.3	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000,00	99.220.400,00	99,22%
1.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	80.000.000,00	79.978.750,00	99,97%
1.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	713.000.000,00	698.485.000,00	97,96%
1.6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	335.000.000,00	329.027.300,00	98,22%
1.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	322.110.000,00	311.188.861,00	96,61%
1.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.504.000.000,00	3.462.748.500,00	98,82%
1.9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.823.600.000,00	31.823.600.000,00	100,00%
1.10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.000.000,00	58.394.500,00	77,86%
1.11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	140.000.000,00	113.406.000,00	81,00%
1.12	Pengadaan Perlengkapan	260.000.000,00	259.781.900,00	99,92%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	Peserta Didik			
1.13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.013.760.000	988.954.000,00	97,55%
1.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	877.620.000,00	805.313.555,00	91,76%
1.15	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	165.000.000	162.062.700	95,56%
1.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.448.674.450	9.920.961.750	95,56%
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.594.403.000,00	29.741.987.439,00	94,14%
2.1	Pembangunan Laboratorium	1.649.102.000,00	1.322.233.630,00	80,18%
2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.071.328.000,00	973.366.370,00	90,86%
2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.265.779.425,00	4.469.565.641,00	84,88%
2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.364.267.400,00	1.097.086.180,00	80,42%
2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	877.232.000,00	737.531.840,00	84,07%
2.6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000,00	49.998.400,00	100,00%
2.7	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	120.000.000,00	119.457.095,00	99,55%
2.8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	731.593.810,00	681.115.000,00	93,10%
2.9				#DIV/0!
2.10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	249.591.000,00	249.475.492,00	99,95%
2.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	572.400.000,00	566.486.550,00	98,97%
2.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.630.500.000,00	17.622.497.881,00	99,95%
2.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.000.000	74.578.110,00	99,44%
2.14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	150.000.000,00	149.957.350,00	99,97%
2.15	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.500.000,00	11.100.000,00	32,17%
2.16	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	31.000.000,00	29.436.600,00	94,96%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	kekerasan, dan intoleransi			
2.17	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000,00	49.814.800,00	99,63%
2.18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	793.600.000,00	791.863.600,00	99,78%
2.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	878.509.365,00	746.422.900,00	84,96%
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.700.432.458,00	15.458.951.405,00	98,46%
3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.810.034.950,00	1.791.284.055,00	98,96%
3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	735.000.000,00	729.576.105,00	99,26%
3.3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	57.000.000,00	56.408.000,00	98,96%
3.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.488.613.500,00	1.475.103.000,00	99,09%
3.5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	60.000.000,00	57.679.000,00	96,13%
3.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.000.000,00	6.672.500,00	66,73%
3.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	390.000.000,00	372.745.400,00	95,58%
3.8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.742.802.350,00	9.662.206.850,00	99,17%
3.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	55.000.000,00	51.462.200,00	93,57%
3.10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44.181.658,00	21.188.000,00	47,96%
3.11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.302.800.000,00	1.229.686.295,00	94,39%
3.12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000,00	4.940.000,00	98,80%
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.958.742.500,00	2.931.552.520,00	99,08%
4.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	172.782.000,00	151.772.020,00	87,84%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
4.2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00%
4.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00%
4.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	153.000.000,00	151.102.300,00	98,76%
4.5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.413.160.500,00	2.413.160.500,00	100,00%
4.6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	19.329.500,00	96,65%
4.7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000,00	48.504.500,00	97,01%
4.8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	75.000.000,00	73.283.700,00	97,71%

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan : 140
- b. UPT TKSD + Guru DPK : 377
- c. Guru SMP + Staf TU : 1.073
- d. Guru SD + Penjaga : 3.461

4.1.6. Kendala yang Dihadapi

- a. Permasalahan
 - 1. Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;



b. Solusi

1. Solusi permasalahan ke satu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi membuat Aplikasi Pendataan LI SM (Lembar Individu Sekolah Madrasah) yang diisi secara online oleh satuan pendidikan baik di Satuan Pendidikan Kemenag dan Bidang PAUD;
2. Solusi untuk permasalahan kedua yaitu melaksanakan inovasi SMART BETTER dan Sahabat Dikmas yang sasarannya adalah mendata masyarakat usia 7-59 tahun putus sekolah/tidak sekolah serta menghimpun data siswa anak tidak mampu berdasarkan Lembar Individu Sekolah Madrasah sehingga tersedianya data valid sebagai sasaran SPM Bidang Pendidikan dan juga untuk menyusun Tahun Anggaran 2025.
3. Mengoptimalkan kinerja Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing- masing SPM Bidang Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bab II Menjelaskan ada 12 Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota :

- a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis;

- I. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*)

4.2.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	788.380.000	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	765.477.000	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	62.042.654	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	140.175.000	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	607.840.000	Setiap Tahun



No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga Kabupaten usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	234.432.700	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	38.800.000	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	8.220.000	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah warga Negara penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	1.462.486.028	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah warga Negara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	8.220.000	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah warga Negara terduga Tuberculosis (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	1.157.735.800	Setiap Tahun



No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	116.301.250	Setiap Tahun

4.2.3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2024 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	4.961	4.961	100 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.961	4.961	100 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	4.960	4.960	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27.821	27.821	100 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	64.980	64.980	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	327.695	327.695	100 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	108.763	108.763	100 %
8.	Pelayanan	Jumlah warga	114.281	114.281	100 %



No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	kesehatan penderita hipertensi	Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	10.017	10.017	100 %
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	973	973	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	4.980	4.980	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan	6.984	6.984	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan masuk dalam kategori Tuntas Paripurna dengan total capaian 100 %.

4.2.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai pengampu bidang urusan Kesehatan ialah sebesar Rp.329.696.071.260 (1,94 % dari APBD). Sedangkan alokasi anggaran penerapan SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ialah sebesar Rp 5.390.110.432 (0,03 % dari APBD dan 1,6 % dari anggaran Dinas Kesehatan). Adapun rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan ialah :



Tabel 4.6
Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	63.258.504.817	50.844.004.313	80,37%
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.868.394.385	45.643.836.879	78,88%
1.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	788.380.000	707.616.900	89,76%
1.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	765.477.000	739.906.400	96,66%
1.3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	62.042.654	61.425.000	99,00%
1.4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	140.175.000	136.505.000	97,38%
1.5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	607.840.000	569.890.000	93,76%
1.6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	234.432.700	233.463.013	99,59%
1.7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	38.800.000	38.325.000	98,78%
1.8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	8.220.000	8.119.500	98,78%
1.9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	1.462.486.028	1.447.803.000	99,00%
1.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	8.220.000	8.085.000	98,36%
1.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.157.735.800	1.138.091.121	98,30%



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
1.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	116.301.250	110.937.500	95,39%

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a ASN = 77
- b Non ASN = 21
- c Bidan = 828
- d Perawat = 1.548
- e Dokter Umum = 258
- f Dokter Spesialis = 61
- g Dokter Gigi dan Dokter gigi spesialis = 55

4.2.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan pada tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu pada pengumpulan data Kesehatan yang terkendala pada banyaknya puskesmas yang tidak bisa tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan ke Dinas Kesehatan, sehingga penginputan data capaian pelaksanaan SPM bidang urusan Kesehatan agak sulit untuk dilakukan di awal bulan.

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal



(SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	12.240.404.377	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	6.407.695.000	Setiap Tahun

4.3.3. Realisasi

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum tahun 2024 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	5.216	5.216	100 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	2.268	2.268	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan masuk dalam kategori Tuntas Paripurna, dengan total capaian 100 %.



4.3.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum ialah sebesar Rp 104.525.957.780 (0,62 % dari APBD). Sedangkan alokasi anggaran penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp.18.648.099.377 (0,11% dari APBD dan 17,84 % dari anggaran Dinas Kesehatan). Adapun rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pekerjaan umum ialah :

Tabel 4.8
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.240.404.377	12.078.872.083	98,68%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.240.404.377	12.078.872.083	98,68%
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7.500.000	7.102.910	94,71%
1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	43.000.000	42.283.300	98,33%
1.3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.445.973.000	10.292.841.361	98,53%
1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	553.276.377	551.558.450	99,69%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
1.5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	350.920.000	348.395.807	99,28%
1.6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	839.735.000	836.690.255	99,64%
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.407.695.000	6.399.560.247	99,87%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.407.695.000	6.399.560.247	99,86%
1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.407.695.000	6.399.560.247	99,86%

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pekerjaan umum. Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan jumlah pegawai yang terdapat pada OPD tersebut sebanyak 137 orang.

4.3.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pekerjaan umum pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan. Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum berjalan maksimal sesuai dengan alokasi anggaran, tanpa adanya kendala yang berarti.

4.4. Bidang Urusan Perumahan rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan (Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023), jenis pelayanan dasar

bidang urusan Perumahan Rakyat untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	216.334.175	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	28.000.000	Setiap Tahun

4.4.3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat tahun 2024 mencapai kategori indeks tuntas paripurna (100%), dengan kondisi terjadinya bencana di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 ini.



Tabel 4.11
Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	36	36	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	2	2	100 %

4.4.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pengampu bidang urusan Perumahan Rakyat ialah sebesar Rp. 48.449.011.249 (1,79 % dari APBD). Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp. 254.734.175 (0,02 % dari APBD dan 1,09 %) dari anggaran Perangkat Daerah). Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM bidang urusan Perumahan Rakyat ialah : Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pendataan yang meliputi pendataan korban bencana yang belum ditangani dan pendataan rumah dikawasan bahaya untuk mendapatkan fasilitasi relokasi, penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, atau dan pembangunan kembali rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Pacitan ada tidak terjadi bencana dan tidak terdapat program yang mengharuskan pelaksanaan penyediaan maupun rehabilitasi dan relokasi rumah masyarakat.



Tabel 4.11
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	244.334.175	242.144.000	99,10%
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.000.000	39.445.000	98,61%
1.1	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	40.000.000	39.445.000	98,61%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.334.175	202.699.000	99,20%
2.1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	176.334.175	175.855.000	99,73%
2.2	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.000.000	26.844.000	95,87%

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan perumahan rakyat. Untuk bidang urusan perumahan rakyat, dukungan personil sejumlah 15 orang yang terdiri dari ASN, tenaga harian lepas dan fasilitator lapangan. sama dengan dukungan personil bidang urusan pekerjaan umum, dikarenakan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan, yaitu sebanyak 137 orang ASN.

4.4.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan. Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tidak terdapat



kendala. dikarenakan pada tahun 2024 ini Kabupaten Pacitan tidak terjadi bencana. Antara lain :

- Penerima bantuan menolak bantuan, karena dana bantuan tidak sesuai keinginan dan belum adanya dana swadaya.
- Adanya program bantuan lain yang dananya lebih besar, sehingga calon penerima bantuan lebih memilih bantuan yang lebih besar.
- Tidak adanya lahan relokasi, sehingga calon penerima bantuan tidak bisa menerima bantuan.

4.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Trantibumlinmas untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

4.5.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas Kabupaten Pacitan ialah :

Tabel 4.13

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten	100 %	3.979.576.484	Setiap Tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
2.	Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	245.613.500	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.401.195.210	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	337.291.290	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	650.000.000	Setiap tahun

4.5.3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Trantibumlinmas tahun 2024 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten	10	10	100 %
2.	Pelayanan	Jumlah warga negara	5.938	5.938	100 %



No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Kebencanaan)	yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.801	3.801	100 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	324	324	100 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	220	220	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas masuk dalam kategori Tuntas Paripurna dengan total capaian 100 %.

4.5.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk bidang urusan trantibumlinmas, diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ialah sebesar Rp 6.044.026.484 (0,36 % dari APBD). Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp 2.168.457.819 (0,13 % dari APBD dan 35,88 % dari anggaran Perangkat Daerah). Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM bidang urusan trantibumlinmas ialah :



Tabel 4.15
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Trantibumlinmas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	3.979.576.484	3.962.245.266	99,56%
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.754.000.000	1.740.440.700	99,23%
1.1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	540.927.500	530.488.700	98,07%
1.2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	79.072.500	78.702.000	99,53%
1.3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.059.000.000	1.056.250.000	99,74%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1.4	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	70.000.000	70.000.000	100,00%
1.5	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5.000.000	5.000.000	100,00%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.225.576.484	2.221.804.566	99,83%
2.1	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.370.463.984	1.368.625.556	99,87%
2.2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	735.112.500	733.438.151	99,77%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	120.000.000	119.740.859	99,78%
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	120.000.000	119.740.859	99,78%
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	2.295.090.525	2.265.580.119	98,71%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	245.613.500	232.238.553	94,55%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	245.613.500	232.238.553	94,55%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.401.195.210	1.389.969.486	99,20%
2.1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	278.908.695	276.823.076	99,25%
2.2	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	189.451.200	188.332.000	99,41%
2.3	Penyusunan rencana kontijensi	104.177.805	103.783.400	99,62%
2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	158.879.850	157.615.000	99,20%
2.5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	669.777.660	663.416.010	99,05%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	337.291.290	336.249.780	99,69%
3.1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	2.400.000	2.340.000	97,50%
3.2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	106.080.000	106.080.000	100,00%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
3.3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	18.859.000	18.817.750	99,78%
3.4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	201.952.290	201.332.030	99,69%
3.5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	8.000.000	7.680.000	96,00%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	310.990.525	307.122.300	98,76%
4.1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	310.990.525	307.122.300	98,76%
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	650.000.000	647.174.449	99,57%
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	532.880.000	531.343.777	99,71%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	152.990.000	151.864.311	99,26%
1.2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	379.890.000	379.479.466	99,89%
2	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	117.120.000	115.830.672	98,90%
2.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	117.120.000	115.830.672	98,90%

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas. Bidang urusan trantibumlinmas diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, sehingga dukungan personil tercantum ialah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja ,
ASN : 41 orang
Non ASN : 72 orang
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,
ASN : 33 orang
Non ASN : 25 orang

4.5.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan trantibumlinmas pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan yang



berarti. Hanya saja pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan terkendala keterbatasan dukungan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, alokasi anggaran sudah optimal, sehingga pelaksanaan penerapan SPM dapat optimal.

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Sosial untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial Kabupaten Pacitan ialah :

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	180.601.000	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	180.601.000	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	180.601.000	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	180.601.000	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100 %	52.912.500	Setiap tahun



4.6.3. Realisasi

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial tahun 2024 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	688	688	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	253	253	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	935	935	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	8	8	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	150	150	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan sosial masuk dalam kategori Tuntas Paripurna, dengan total capaian 100 %.



4.6.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk bidang urusan sosial, diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ialah sebesar Rp13.084.305.341 (0,77 % dari APBD). Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp 547.400.000 (0,03 % dari APBD dan 4,18% dari anggaran Perangkat Daerah). Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM bidang urusan sosial ialah :

Tabel 4.17
Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung
SPM Urusan Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	722.404.000	714.025.700	98,84%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	722.404.000	714.025.700	98,84%
1.1	Penyediaan permakanan	95.206.745	94.824.500	99,60%
1.2	Penyediaan alat bantu	237.583.565	236.519.500	99,55%
1.3	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	217.556.690	216.363.500	99,45%
1.4	Pemberian layanan rujukan	172.057.000	166.318.200	96,66%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
B	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	52.912.500	47.898.400	90,52%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	52.912.500	47.898.400	90,52%
1.1	Penyediaan makanan	5.000.000	0	0,00%
1.2	Pelayanan dukungan Psikososial	47.912.500	47.898.400	99,97%

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial. Bidang urusan sosial diampu oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

ASN : 31 orang
Non ASN : 24 orang

4.6.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial pada tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengampu, yaitu :

- 1. Pengumpulan data
 - Pengumpulan data masih kurang tertib dan kurang valid
 - Pengumpulan data terkendala SDM dan sarana yang kurang (kendaraan operasional dan computer)
 - Belum menemukan metode atau system pengumpulan data yang cepat dan akurat
- 2. Perhitungan kebutuhan
 - Penghitungan kebutuhan belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum memahami teknis penghitungan kebutuhan
 - Penghitungan kebutuhan terkendala kurangnya SDM
- 3. Perencanaan dan penganggaran
 - Masih terdapat kegiatan yang kurang mendapatkan prioritas dikarenakan kurang pemahaman terhadap SPM bidang sosial



- Sering terjadi penganggaran tidak sesuai dengan perencanaan, misalnya anggaran penerapan SPM terkena refocusing
- 4. Pelaksanaan
 - Kurang pemahaman terhadap SPM menyebabkan pelaksanaan program kegiatan kurang maksimal
 - Kurangnya SDM menyebabkan penerapan SPM kurang maksimal
- 5. Lain-lain
 - Aplikasi e-SPM rumit dan sulit dipahami
 - Pada e-SPM Bidang Sosial terdapat nama program yang tidak muncul, yaitu Program Penanganan Bencana
 - Pada aplikasi tidak terdapat menu simpan dalam bentuk excel menyulitkan dokumentasi laporan SPM

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Pacitan dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan berhasil ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada level nasional. Upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan selama tahun 2024 senantiasa dilakukan dengan kerja keras dan itikad baik oleh Bupati Pacitan beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap indikator kinerja guna pelayanan masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pacitan tahun 2024 merupakan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan disusun berkat kerjasama dan partisipasi semua pemangku kepentingan pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pelaku perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang dibiayai oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian indikator makro, kinerja kunci dan kinerja penunjang merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Oleh karena itu kita harus meningkatkan komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kami ucapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Pacitan secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun 2024.

Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 ini



terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun – tahun mendatang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pacitan. Aamiin.

Pacitan, Maret 2025

 **BUPATI PACITAN**

INDRATA NUR BAYUAJI